PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN DI DESA

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS UNTUK BALAI PERPUSTAKAAN

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

O l e h :

Dra. SOLFEMA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG
1989

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yangmahaesa, yang melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini ditujukan kepada mereka yang sedang mempersiapkan diri atau tengah bergulat dalam pembangunan masyarakat desa. Apakah mereka itu perencana, pengelola atau pelaksana teknis dalam berbagai jenis kegiatan pembangunan di desa. Apakah mereka yang bergerak secara khusus di bidang pertanian, industri kecil/industri rumah tangga, koperasi, kesehatan, keagaamaan dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut memerlukan pendekatan pendidikan. Oleh karena itu buku ini penulis beri judul : Pendidikan dan Pembangunan di Desa.

Mengingat kondisi desa, jika tidak memberikan penekanan yang lebih pada aspek pendidikan, setidaknya pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan di desa harus dijalankan secara simultan. Selanjutnya sehubungan dengan kondisi desa dan keterbatasan sistem pendidikan persekolahan, maka pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah dapat dijadikan pilihan utama dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan di desa. Hal yang demikian menjadi bahasan dalam buku ini.

Sebagaiman yang dikemukakan terdahulu, bahwa buku ini ditujukan kepada mereka yang sedang mempersiapkan diri atau tengah bergulat dengan masalah pembangunan desa, maka dengan sendirinya buku ini juga diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar sekolah FIP IKIP Padang dalam rangka memperluas wawasan mereka tentang pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah, dalam hubungannya dengan permasalahan dan pembangunan desa.

Karena berbagai keterbatasan penulis, penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, di dalamnya

akan ditemukan berbagai kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat menghargai sumbangan fikiran dari para pembaca berupa kritik atau pun saran, hingga untuk terbitan berikutnya penulis dapat melakukan perbaikan-perbaikan guna pengembangan ke arah yang lebih memadai.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bermanfaat adanya.

Padang, Januari 1989

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
I.	PENDAHULUAN	1
II.	PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	4
	1. Pembangunan Nasional	4
	2. Pembangunan Pedesaan	9
III.	MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	18
	1. Faktor Manusia	18
	2. Faktor Alam	23
	3. Faktor Pengaruh Kota	26
	4. Faktor Prasarana/Sarana	27
IV.	PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN	30
	1. Potensi Manusia dalam Pembangunan Masyarakat Desa	30
	2. Membangun Manusia melalui Pendidikan	31
V.	PENDIDIKAN DI DESA DAN MASALAHNYA	36
	1. Pendidikan Persekolahan	36
	2. Pendidikan Luar Sekolah	38
	3. Pendidikan Keseharian (Informal)	40
VI.	PEMBENAHAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	43
	1. Pembenahan PLS dalam Memacu Pembangunan Desa	43
	2. Langkah-langkah Pembinaan dan Pengembangan PLS	48
	3. Pelaksana PLS di Desa	54
	4. Tenaga Kependidikan	55
	5. Koordinator	56

Halaman

VII. PRIORITAS PROGRAM PLS DI DESA 59
1. Kelompok Belajar (Kejar) Paket 'A' 59
2. Kelompok Belajar (Kejar) Usaha 60
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 62
4. Pembinaan Generasi Muda 62
5. Kelompok Belajar Pertanian 64
6. Kelompencapir 65
7. Wirid-wirid Keagamaan 67

DAFTAR BACAAN 69

I. PENDAHULUAN

Menyimak rumusan MPR tentang hakekat pembangunan Nasional Indonesia, yakni membangun manusia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Rumusan ini mengandung makna, bahwa pembangunan itu adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa. Kelihatannya, amanat rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR sudah diusahakan semaksimal mungkin. Hal ini terlihat dari berbagai program dan petugas yang turun ke desa-desa.

Memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang berdomisili di desa (sekitar 80%), maka usaha yang demikian memang harus dilakukan. Apalagi jika memperhatikan bahwa karena berbagai situasi dan kondisi, khususnya dalam bidang pendidikan, desa selalu ketinggalan dalam pembangunan jika dibandingkan dengan kota. Fasilitas pendidikan jelas sangat terbatas di desa, meskipun banyak anak-anak desa yang memperoleh kesempatan pendidikan di kota khususnya melalui jalur pendidikan persekolahan, mereka tidak betah tinggal di desa. Akibatnya potensi desa untuk dikembangkan sulit menjadi kenyataan.

Jika pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya, jika pembangunan masyarakat desa adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material dan spiritual melalui aktifitas masyarakat itu sendiri. Atau dengan kata lain, jika pembangunan itu adalah usaha manusia untuk manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan haruslah mendapat perhatian utama.

Berdasarkan konsep pembangunan di atas, tidak dapat tidak pembangunan di berbagai bidang haruslah sejalan dengan pembangunan di bidang pendidikan. Bahkan lebih tegas lagi pembangunan dapat dikatakan sebagai tanggung jawab pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa masyarakat

sekaligus sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka dalam masyarakat desa diperlu - kan orang-orang yang mampu memikir, merencanakan, dan mengelola pembangunan. Untuk menghasilkan pemikir, peren cana dan pengelola pembangunan ini jelas memerlukan usa- ha pendidikan. Tanpa pendidikan yang memadai sukar untuk mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pem bangunan, sukar mengharapkan manusia yang mampu memba - ngun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan nasional.

Memperhatikan peranan pendidikan dalam pembangunan, terlihat bahwa susah untuk memisahkan antara masalah pem bangunan dengan masalah pendidikan. Pada dasarnya masa - lah-masalah pembangunan masyarakat desa dapat dipecahkan melalui pendidikan, tapi pendidikan di desa itu sendiri mengalami berbagai permasalahan, di antaranya enggannya tenaga terdidik untuk tinggal di desa guna membangun de- sanya. Keadaan yang demikian beranjak pula dari permasa- lahan pendidikan persekolah yamg belum mampu menghasil - kan tenaga-tenaga yang siap bekerja di desa untuk meme - cahkan masalah-masalah yang aktual dalam masyarakat. Oleh karena itu jika sudah terdapat kesepakatan bahwa pendidikan itu merupakan hal yang menentukan keberhasil- an pembangunan di desa, perlu memilih strategi/sistem pendidikan yang tepat yang mampu memedahkan masalah yang aktual dalam masyarakat desa.

Untuk melihat peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat desa, khususnya melalui pendidikan luar seko- lah, perlu diketahui apa hakekat pembangunan nasional dan pembangunan pedesaan, masalah-masalah pembangunan masyarakat desa dengan segala faktor penunjang dan fak - tor penghambatnya, keterkaitan pembangunan dengan usaha pendidikan yang akan dibahas dalam bab II, III dan IV.

Selanjutnya dapat pula didiskusikan pendidikan di desa dan permasalahan-permasalahannya, alasan perlunya pembenahan pendidikan luar sekolah dalam rangka mempercepat lajunya pembangunan masyarakat desa, serta priritas program pendidikan luar sekolah yang semestinya mendapatkan perhatian, masing-masing akan di diskusikan dalam bab V, VI, dan VII.

II. PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa pembangunan pedesaan, khususnya pembangunan masyarakat desa tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan nasional, bahkan pembangunan masyarakat desa perlu perlu mendapat penekanan yang lebih, karena masyarakat desa merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, apalagi dengan memperhatikan keterbelakangan desa. Oleh karena itu pembangunan masyarakat desa haruslah mengacu kepada konsep pembangunan nasional. Untuk itu sebelum membicarakan pembangunan masyarakat desa melalui pendidikan, khususnya melalui pendidikan luar sekolah, perlu pembahasan terhadap konsep pembangunan nasional itu sendiri

1. Pembangunan Nasional

Dalam membahas konsep pembangunan nasional perlu dikemukakan tujuan, landasan dan asas pembangunan nasional itu sendiri, sebagai berikut:

a. Tujuan Pembangunan Nasional

Pada hakekatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia adalah merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu titik sentral dari pembangunan adalah pembangunan manusia, yakni pembangunan manusia yang seimbang, yakni tercapainya kemajuan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya pembangunan ini bukan hanya untuk kepentingan sekelompok manusia saja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang keragaman, baik keragaman secara sosial, budaya serta keyakinan bergama, maupun keragaman tempat berdomisili, baik di desa atau di kota atau pun keragaman-keragaman lainnya. Oleh karena itu usaha pembangunan pada hakekatnya

adalah merupakan:

1) Usaha gerakan manusiawi, sehingga gejala sosial dan budaya senantiasa diabadikan bagi kepentingan dan hajat hidup manusia dan masyarakat itu sendiri.
2) Pembangunan bukan merupakan gerakan sentral, melainkan merupakan usaha yang selalu condong ke arah perbaikan taraf dan tata kehidupan serta penghidupan, sesuai dengan persepsi sosial budaya masyarakat setempat.
3) Pembangunan haruslah selalu menyintuh berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.
4) Arah dan prioritas dalam kebijakkan pembangunan pada hakekatnya merupakan manisfestasi dari hasil penangkapan atau penilaian terhadap realitas manusia dalam konteks sosial dan budaya setempat.
5) Pembangunan manusia atau masyarakat dalam suatu daerah haruslah bertujuan untuk perbaikan taraf kehidupan serta penghidupan masyarakat setempat.

Hakakat pembangunan tersebut di atas dirumuskan secara tegas dalam tujuan pembangunan Nasional oleh para wakil rakyat dalam sidang MPR sebagaimana yang termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai berikut:

> Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suatu perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. (Sekretariat Negara, 1983: 42)

b. <u>Landasan Pembangunan Nasional</u>

Landasan pembangunan nasional berhubungan dengan filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu pembangunan nasional mencer -

minkan identitas dan kepribadian Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka gerak pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilakukan haruslah diwarnai oleh pandangan hidup atau filsafat bangsa Indonesia. Pembangunan di Indonesia, baik untuk jangka panjang, mau pun untuk jangka pendek harus sesuai dengan landasan yang tertuang dalam pola dasar pembangunan nasional, sesuai dengan yang dirumuskan dalam GBHN. Pembangunan jangka pendek sekalipun tidak boleh bertentangan dengan landasan dan asas yang telah ditetapkan, meski pun dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan landasan pembangunan nasional dengan ketetapan Nomor II/MPR/1987, yang merupakan GBHN dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila di samping berkedudukan sebagai dasar negara, ia juga merupakan filsafat, pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasari oleh keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadai, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungannya dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, mau pun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Keadaan yang demikian harus tergambar dalam setiap gerak dan langkah pembangunan nasional.

Undang-undang Dasar 1945 memiliki dan memberikan landasan operasional yang mampu memberikan pengarahan dinamika yang jelas dan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu Undang-undang Dasar 1945 akan dapat menjadi landasan pembangunan nasional yang kokoh dan kuat tanpa dipengaruhi oleh perobah-

an dan kemajuan zaman.

c. Asas Pembangunan Nasional

Jika diperhatikan hakekat dan tujuan pembangunan, akan terlihat dua kutup yang selalu bertentangan, yakni antara kenyataan dan cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai. Usaha merobah atau mendekatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan atau mendekati keinginan inilah yang dikatakan dengan pembangunan. Pada hakekatnya usaha untuk mendekatkan kedua kutup yang bertentangan ini tidak pernah berakhir, karenanya kemungkinan pelaksanaan pembangunan dapat saja tergelincir dari landasan yang sudah ditetapkan, maka perlu ditetapkan asas-asas yang dapap menutup kemungkinan tersebut. GBHN telah menetapkan asas-asas pembangunan nasional sebagai berikut:

1) Asas Manfaat. Dalam asas manfaat terkandung sutu prinsip, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Asas ini memberikan bimbingan untuk bersifat selektif di dalam memilih atau menentukan kegiatan pembangunan. Pertimbangan kemanfaatan bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara haruslah menjadi pegangan penting dalam pembangunan, baik yang sedang di laksanakan mau pun yang akan dilaksanakan.

2) Asas Demokrasi. Asas demokrasi yang dimaksudkan di sini tentu saja demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila meliputi berbagai bidang, yakni bidang politik, sosial, ekonomi serta sejauh mungkin menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat di dalam penyelesaian masalah-masalah nasional. Asas ini memberikan bimbingan

untuk menerapkan paham demokrasi Pancasila, tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang-bidang sosial dan ekonomi.

3) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan. Dalam asas ini terkandung prinsip bahwa untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa haruslah merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan yang dilandasi oleh cinta kasih sesama warga negara tanpa memandang berbagai keragaman. Semangan kekeluargaan ini akan membimbing kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama yang tergambar dalam semangat gotong royong.

4) Asas Adil dan Merata. Dalam asas adil dan merata terkandung prinsip bahwa hasil-hasil materil dan spirituil yang dicapai dalam pembangunan nasional harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya kepada bangsa dan negara. Asas ini memberikan bimbingan untuk mengikhtiarkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, baik yang bersifat material maupun spiritual. Dalam hal ini perlu diikhtiarkan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan menikmati hasil pembangunan, sehingga setiap warga negara bisa menikmati kelayakan hidup.

5) Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan. Dalam asas ini terkandung prinsip bahwa diperlukan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan keduniaan dengan kepentingan-kepentingan akhirat, antara kepentingan material dengan kepentingan spiritual, antara kepentingan jiwa dengan raga, antara kepentingan individu dengan masyarakat, amtara kepentingan kehidupan perikehidupan laut, udara dan darat, antara kepentingan perikehidupan

masyarakat kota dengan masyarakat desa, antara kepen - tingan internasional dengan kepentingan nasional. Asas ini memberikan bimbingan untuk selalu mengikhtiarkan pelaksanaan pembangunan seimbang, serasi dan selaras di antara berbagai kepentingan di atas tadi, sehingga ti - dak terjadi kepincangan-kepincangan yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebab Pancasila menghendaki keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

6) Asas Kesadaran Hukum. Dalam asas ini terkandung prinsip bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan negara un - tuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Asas ini memberikan bimbingan kepada seluruh abdi negara untuk sadar, menghayati, taat dan berdisiplin pribadi yang tinggi terhadap pelaksanaan tertib hukum. Asas ini juga mengandung bimbingan untuk selalu benar, jujur, disip - lin dan menjujung tinggi norma-norma hukum di dalam pelaksanaan pembangunan.

7) Asas Percaya pada Diri Sendiri. Dalam asas ini terkandung prinsip bahwa pembangunan nasional harus berlandasan pada kepercayaan akan kemampuan kekuatan diri sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bang sa. Asas ini memberikan bimbingan untuk semaksimal mung kin menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri di dala m melaksanakan pembangunan, serta tidak mengantungkan diri pada kekuatan atau bantuan bangsa dan negara lain.

2. Pembangunan Pedesaan

Sesuai dengan tujuan, hakekat dan asas pembangunan yang dikemukakan terdahulu, maka pembangunan pedesaan yang dimaksudkan di sini adalah juga pembangunan manu - sia seutuhnya di pedesaan. Berbicara tentang manusia,

tidak mungkin mengabaikan manusia itu dalam hubungannya dengan manusia lain, karena manusia itu tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Oleh karena itu manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Sehingga dengan demikian jika membicarakan pembangunan manusia di desa berarti membicarakan pembangunan masyarakat desa. Untuk membi - carakan pembangunan masyarakat desa kiranya perlu dibicarakan apa yang dimaksud dengan pembangun masyarakat desa serta penggerak, sumberdaya dan sasaran pembangunan di desa.

a. Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa

Untuk memahami pengertian pembangunan masyarakat desa dapat dikemukan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar, sebagai berikut:

1) Menurut Surjadi:

Pembangunan masyarakat ialah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh ma - syarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasasi oleh inisiatif masyarakat, tetapi apabial inisiatif ini tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar suapaya kegiatan dan response yang antusias terjamin . . .

2) Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

Pembangunan masyarakat adalah kegiatan untuk mem - binan dan meningkatkan kehidupan masyarakat, baik yang berkenaan dengan kebendaan (material) maupun yang ber - kenaan dengan sikap mental dan kerokhanian yang diren - canakan dan dilaksanakan dengan swadaya yaitu dari ma - syarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan di dalam masyarakat.

3) Menurut Hamijoyo:

Pembangunan masyarakat dapat didefinisikan sebagai

sesuatu proses yang ditumbuhkan untuk menciptakan kon - disi-kondisi bagi kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat seluruhnya, dengan melalui partisipasi aktif masyarakat yang bersangkutan, dan dengan kepercyaan sepenuh mungkin pada inisiatif masyarakat.

Ketiga definisi pembangunan masyarakat di atas menekankan kepada 'partisipasi aktif', yakni partisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat harus mampu membangun dirinya sendiri, tegasnya agen pembangnnan hanyalah men ciptakan situasi yang favorabel bagi terciptanya pelu - ang untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menciptakan situasi yang favorable ini perlu usaha pendidikan, sebab tanpa pendidikan akan sulit bagi seseorang atau masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Jadi dengan demikian pekerjaan pembangunan bukan hanya membangun jembatan-jembatan, mendirikan sekolah-sekolah, meningkatkan produksi tani, mengobati ma - syarakat yang sakit atau memberikan kredit. Jika hanya itu saja, akan membuat masyarakat tetap miskin, tetap tergantung kepada agen pembangunan (pemerintah). Sebab bukankah ketergantungan kepada orang lain berarti ke - miskinan.

Pekerjaan pembangunan masyarakat desa haruslah berupa bantuan sementara agar masyarakat mampu menolong dirinya sendiri. Tentu saja pekerjaan ini lebih menekan kan kepada aspek pendidikan. Namun demikian perlu ditekan di sini, bahwa pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan persekolahan saja, tapi juga pendidikan di luar sistem persekolahan, yakni pendidikan luar sekolah.

Melalui jalur pendidikan luar sekolah, semua petugas pembangunan masyarakat dapat dijadikan sebagai tenaga kependidikan. Sehingga dengan demikian pembangunan

yang dilaksanakan bukan hanya sekedar pembangunan pisik yang mengakibatkan ketergantungan masyarakat menjadi lebih besar atau pemindahan teknik-teknik baru saja, tapi dalam kedua usaha itu dapat diusahakan terjadinya perobahan sikap mental yang pada akhirnya membuat ma - syarakat mampu berpartisipasi dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

b. Subjek dan Objek Pembangunan

Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, bahwa ma - nusia sekaligus adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan berarti manusia itu sebagai penggerak pembangunan, yakni manusia-manusia pemikir, perencana dan pengelola pembangunan. Golongan kedua adalah manusia sebagai objek pembangunan, yakni mereka yang memerlukan pertolongan untuk mampu menolong diri - nya sendiri. Lalu siapa dan apa saja tugas subjek pem - bangunan ini dan bagaimana pula manusia sebagai subjek pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam bahsan berikut:

1) Subjek Pembangunan. Subjek atau penggerak pem - bangunan ialah siapa saja yang ikut berfikir, merenca - nakan atau mengelola kegiatan masyarakat agar masyara - kat mampu menolong dirinya sendiri. Di negara kita ke - banyakkan pengerak pembangunan ini adalah orang-orang pemerintah, seperi para guru, penyuluh pertanian lapang an, para petugas kesehatan, para petugas dan penegak hukum, petugas lapangan keluarga berencana, aparat pe - merintahan desa dan sebagainya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa penggerak pembangunan itu terdiri dari orang-orang swasta, baik secara individu seperti para tokoh masyarakat atau secara terorganisir dalam berbagai organisasi sosial, baik dari dalam atau

dari luar kelompok masyarakat itu sendiri.

Agar pembangunan tidak memperbesar ketergantungan, maka penggerak pembangunan hendaknya menghindarkan program pembangunan yang bersifat datang dari atas atau seorang penggerak pembangunan hendaknya janganlah membawa seperangkat rencana yang akan dilaksanakannya dalam rangka pembangunan, tetapi memperhatikan apa yang harus dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Untuk ini ada beberapa peranan yang dapat dimainkan oleh seorang penggerak pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rogers, sebagai berikut: [1)]

a) Membangkitkan kebutuhan untuk berobah. Sebagai langkah awal seorang penggerak pembangunan perlu membantu masyarakat untuk menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu, yakni kebutuhan untuk berobah, terutama sekali perobahan dalam tingkah laku. Perobahan tingkah laku sering diperlukan pada masyarakat yang masih terbelakang, yakni kurang mampunya mereka dalam perencanaan, rendahnya aspirasi, pasrah terhadap nasib, puas hidup apa adanya yang merupakan ciri umum masyarakat pedesaan. Untuk ini penggerak pembangunan dapat mengemukakan alternatif-alternatif yang mungkin ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada, mendramatisasi permasalahan tersebut dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu mengatasinya. Penggerak pembangunan tidak hanya menunjukkan kebutuhan masyarakat, tapi juga membantu masyarakat dalam menumbuhkan kebutuhannya dengan cara konsultatif dan persuasif.

b) Mengadakan hubungan untuk perobahan. Begitu kebutuhan untuk berobah telah timbul, penggerak pembangunan harus membina hubungan yang rapport dengan masyara -

---

1) Disarikan dari Rogers, Everett M. dan Shoemaker dalam buku Memasyarakatkan Ide-ide Baru, Terjemahan Abdilah Hanafi, Surabaya: Usaha Nasional, 1981

kat. Dia dapat meningkatkan keakraban dengan menciptakan kesan dapat dipercaya, jujur dan empathi dengan kebutuhan dan masalah masyarakat. Masyarakat terlebih dahulu harus menerima penggerak pembangunan secara pisik dan sosial sebelum mereka diminta untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

c) Mendiagnosis masalah. Penggerak pembangunan harus menganalisa situasi permasalah masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diarahkan perobahan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperoleh kesimpulan diagnosis yang tepat, penggerak pembangunan harus memahami persoalan masyarakat dari sudut pandangan masyarakat itu sendiri. Secara psikologis penggerak pembangunan harus masuk kedalam situasi masyarakat menurut pandangan masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan kemampuan empathi yang tinggi.

d) Memotivasi perobahan diri masyarakat. Setelah penggerak pembangunan menggali berbagai kemungkinan masyarakat mencapai tujuan mereka, dia harus membangkitkan motivasi untuk merobah diri sendiri.

e) Merencanakan tindakan pembangunan. Seorang penggerak pembangunan harus berusaha mempengaruhi terjadinya perobahan tingkah laku berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maksudnya penggerak pembangunan berusaha bersama sama dengan masyarakat menyusun rencana-rencana pembangunan yang hendak dilakukan. Rencana ini hendaknya dirasakan oleh masyarakat sebagai rencana mereka sendiri, sehingga mereka merasa berkepentingan dengan dengan rencana tersebut.

f) Memelihar dan mencegah program pembangunan dari kemacetan. Tidak jarang program pembangunan dapat menjadi macet karena tantangan dari golongan masyarakat yang paling tradisional (kolot). Untuk itu perlu sekali informasi yang menunjang dan menghidupkan semangat masyarakat dengan menetralisir tantangan-tantangan

yang datang dari golongan masyarakat tradisional tadi.

g) Menciptakan hubungan yang terminal. Seperti yang dikemukakan terdahulu bahwa pembangunan masyarakat dari penggerak pembangunan hendaknya berupa bantuan yang bersifat sementara, jangan menimbulkan keter - gantungan. Oleh karena itu tujuan akhir dari bantuan yang diberikan oleh seorang penggerak pembangunan hendaknya adalah masyarakat mampu membangun dirinya sendiri. Jika keadaan yang demikian sudah tercapai maka penggerak pembaruan dapat memutuskan hubungan - nya untuk sementara.

2) Objek Pembangunan. Objek pembangunan masyarakat desa tentu saja seluruh masyarakat yang berada dalam desa itu sendiri. Masyarakat dalam suatu desa jelas merupakan suatu kesatuan sosial, namun demikian akan di - temukan perbedaan-perbedaan persepsi terhadap pembangunan, ada yang mengharapkan dan mengusahakan terjadinya perobahan ke arah kehidupan yang lebih baik, ada yang menerima keadaan apa adanya dan bahkan ada yang menolak sama sekali program pembangunan. Untuk mempermudah penggerak pembangunan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan, perlu diketahui kategori masyarakat dalam suatu sistem sosial tersebut. Rogers mengemukakan 5 kategori masyarakat dalam suatu sistem sosial, yakni:

a) Innovator disebut juga sebagai si petualang karena keinnovatorannya. Petualangan selalu menggoda hati para innovator. Mereka gemar sekali mencoba setiap gagasan baru. Minat yang demikian ini mendorong me - reka untuk mencari hubungan dengan pihak-pihak dari luar kelompok masyarakatnya, keluar dari lingkungan teman-temannya sendiri. Persahabatan dan komunikasi antara para innovator seringkali terjadi walau pun

mereka terpisah oleh jarak geografis yang jauh.

Menjadi innovator memang perlu beberapa persyaratan, antara lain ia harus mempunyai sumber keuangan yang cukup kuat karena suatu kali mungkin mereka akan menderita kerugian akibat innovasi yang tidak menguntungkan. Selain itu ia juga harus memiliki kemampuan daya fikir yang cerdas untuk dapat menerapkan dan memahami pengetahuan teknik yang rumit.

Nilai yang paling menonjol pada innovator adalah berani dalam bertualang. Mereka suka pada hal-hal yang menyerempet-meyerempet bahaya, berani mengambil resiko dan seringkali terburu nafsu. Karena itu innovator harus juga siap untuk menerima kemunduran jika salah satu percobaan yang dilakukannya ternyata tidak berhasil.

b) Pelopor. Seorang pelopor sering dijadikan tauladan dari masyarakat lingkungannya. Jika innovator lebih bororien - tasi ke luar sistem sosialnya, maka si pelopor berorien - tasi ke dalam sistem sosialnya. Dia biasnya meneliti lebih dahulu suatu hal yang baru sebelum berkeputusan untuk menggunakannya. Kelompok ini sering kali terdiri dari para pemuka masyarakat. Anggota sistem sosial lainnya calon penerima konsep pembaruan biasanya mencari si pelopor untuk meminta nasehat dan keterangan mengenai sesuatu yang baru itu. Selain itu kelompok ini juga umumnya dicari para penggerak pembangunan untuk dijadikan teman dalam usaha perobahan sikap masyarakat ke arah yang lebih baik, untuk mempercepat proses pembangunan. Karena para pelopor ini mudah berkomunikasi dan cepat tanggap terhadap konsep konsep pembangunan, ia cocok sekali dijadikan sebagai teladan bagi anggota masyarakat lainnya. Lagi pula biasanya setiap yang dikatakannya sering diikuti oleh warga masyarakat, sehingga dengan demikian pelopor ini cocok sekali dijadikan sebagai penyambung pesan-pesan pembangunan yang

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

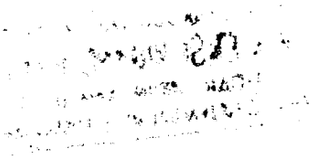

374.001
S0C
P1

sulit diterima oleh anggota masyarakat lainnya.

c) Pengikut dini. Pengikut ini menerima pesan-pesan pembangunan hanya beberapa saat setelah rata-rata anggota lain menerimanya. Ia dengan mudah berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, tapi jarang diantara mereka yang memegang posisi kepemimpinan. Sebelum berpartisipasi dalam pembangunan terlebih dahulu dia mempertimbangkan untung ruginya berkali-kali. Mereka tidak menjadi orang yang pertama dan tidak pula menjadi orang yang terakhir.

d) Pengikut akhir. Pengikut akhir ini ikut berpartisipasi dalam pembangunan setelah semua orang terlibat. Ikutnya mereka berpartisipasi biasanya lebih banyak karena keterpaksaan. Mereka ikut berpartisipasi dengan sikap skeptis dan hati-hati. Orang-orang yang begini perlu dibujuk dan disadarkan dengan berbagai cara, bahkan kadang-kadang mereka memerlukan kekerasan sebelum mereka menyadari bahwa pada hakekatnya pembangunan itu adalah untuk dirinya sendiri.

e) Si kolot. Sikolot adalah orang yang selalu menantang kegiatan pembangunan. Mereka adalah orang yang paling sempit pandangan dan wawasannya. Mereka selalu berorientasi pada masa lalu. Baik buruknya sesuatu selalu diukur dengan kebiasaan masa lalu.

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

III. MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Masalah-masalah pembangunan masyarakat desa sangat beragam, hal ini disamping dikarenakan masyarakat desa sebagai kesatuan sosial mereka juga makhluk individu yang masing-masingnya berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebut sebagai faktor manusia. Selain dari itu masih ada faktor yang berpengaruh, yakni faktor alam, letak desa, sarana dan prasarana.

1. Faktor Manusia

Karena subjek dan objek pembangunan adalah manusia, maka faktor manusia merupakan faktor yang dominan dalam masalah pembangunan masyarakat desa. Faktor ini dapat digolongkan kepada: tingkat pendidikan, mentalitas, dan sosial budaya.

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sekelompok masyarakat akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan di desa, hal ini disebabkan pembangunan itu memerlukan tenaga terampil, sedangkan keterampilan dapat diperoleh melalu pendidikan. Selanjutnya masalah ini akan dibahas lebih mendalam pada bab VI.

b. Mentalitas

Mentalitas yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa adalah mentalitas yang menghambat pembangunan. Koentjaraningrat mengemukakan tiga jenis sikap mental yang menghambat pembangunan, yakni sikap mental petani, priyayi/pegawai dan sikap mental transisi.

1) Sikap mental petani. Salah satu sikap mental yang menghambat pembangunan adalah sikap mental petani, yakni

sikap mental yang puas dengan hidup apa adanya, pasrah dengan apa yang terjadi apakah itu baik atau buruk, semuanya diterima karena merupakan kodrat alam. Sikap mental yang demikian dinamakan dengan sikap mental petani, karena petani (petani tradisional) menabur bibit, lalu menunggu masa menuai. Bial masa menuai datang, mereka tidak akan kecewa betul kalau panen gagal atau separo gagal. Yang penting bagi mereka, mereka masih sempat menikmati hidup.

Barangkali dalam hal ini kita perlu menyimak pembicaraan antar petani desa atau antar petani dengan orang luar berkenaan dengan produksi tani mereka. Bila seseorang bertanya berkenaan dengan hasil panen yang mereka peroleh, jawabannya hampir dapat dipastikan "lumayan !". Lumayan untuk sekedar menghidupi keluarga. Hal ini disebabkan masyarakat desa tidak merasakan kebutuhan hidup yang banyak.

Jarang sekali kita dengar masyarakat desa membandingkan prestasinya dengan prestasi orang lain dengan perasaan kecewa, jangan membandingkan hasil panen merekatdengan hasil panen yang mampu dicapai oleh masyarakat lain di luar desanya. Hal ini erat kaitannya dengan alam pikiran monisme dan paham tradisional.

2) Sikap mental priyayi. Sikap mental ini diduga ada kaitannya dengan lamanya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, ratusan tahun lamanya. Dalam masa yang panjang itu bangsa Indonesia--apalagi masyarakat desa--dijadikan masyarakat kelas dua, masyarakat yang selalu diperintah oleh orang lain. Keadaan yang demikian diperburuk lagi oleh sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa penjajah yang memang hanya memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan hanya untuk jadi pesuruh.

Akhirnya datanglah masa kemerdekaan, saat bangsa Indonesia dapat mengatur dirinya sendiri. Datanglah kesempatan untuk jadi pengatur, khususnya jadi pengatur rakyat (pelayan rakyat), jadi pegawai. Pekerjaan ini memberikan kebanggaan yang tidak tanggung-tanggung.

Jadi pegawai--apalagi menjadi penguasa--merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa istimewa. Akibat dari pandangan ini, timbul pandangan yang merendahkan kerja kasar/keras yang produktif. Bahkan masyarakat beranggapan bila seorang intelektual--tamatan suatu lembaga pendidikan formal--belum memperoleh pekerjaan bial yang bersangkutan bergerak dalam bidang kewiraswataan, tidak jadi pegawai negeri.

3) Sikap mental transisi. Sikap mental ini merupakan sikap mental yang sudah agak maju dibandingkan dengan sikap mental petani atau priyayi. Sikap mental ini sudah mulai berorientasi kepada masa depan yang lebih baik, tapi dalam meraih masa depan yang lebih baik tersebut mereka menggantungkan harapan yang banyak pada bantuan orang lain, mengandalkan koneksi, kurang percaya kepada diri sendiri.

Ciri lain dari sikap mental transisi ini ialah kecenderungan untuk bergantung kepada orang lain, khususnya bergantung kepada keluarga yang dinilai lebih mampu. Padahal sedikit kelebihan anggota keluarga lain itu adalah berkat perjuangan yang berat. Meskipun demikian yang bersangkutan, keluarga yang sedikit mampu tersebut tidak keberatan memberikan bantuan. Tidak jarang bantuan yang diberikan itu berupa materi--ibarat memberikan ikan kepada yang membutuhkannya, tanpa menunjukkan bagaimana cara memperoleh ikan tersebut--akibatnya yang dibantu jadi tergantung kepada yang memberikan bantuan. Akibat lebih lanjut keluarga yang sedikit mampu tersebut tidak bisa maju dan berkembang secara maksimal.

c. Struktur Sosial

Masyarakat desa sebagai suatu sistem sosial berbeda dengan sedemikian rupa, sehingga tercipta struktur didalamnya. Struktur sosial tercipta karena ada status dan posisi anggota di dalamnya, yang kelihatan dalam hirarki kedudukan anggota masyarakat. Organisas formal seperti lembaga pemerintahan atau perusahaan mempunyai struktur sosial resmi yang tersusun rapi yang terdiri dari hirarki posisi jabatan, ada yang menduduki posisi bawahan, dia akan menerima perintah dan akan melaksanakannya. begitu juga dalam organisasi informal, misalnya keluarga, terdapat tingkatan struktur yang serupa yang kelihatan dalam hubungan interpersonal di antara anggota-anggota - nya, yang menentukan siapa yang boleh berhubungan dengan siapa dan dalam situasi bagaimana.

Pada hakekatnya, baik struktur sosial yang formal, mau pun yang informal berpengaruh terhadap terhadap ting kah laku manusia dan perobahan tingkah laku dalam menjawab rangsangan pembangunan. Struktur sosial dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan, baik mempercepat atau memperlambat proses pembangunan.

Sesuai dengan pola paternalistik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yakni rasa hormat yang mendalam terhadap anggota masyarakat yang mempunyai kedudukan yang tinggi menimbulkan kepenurutan dan kepatuhan, tidak ada keberanian untuk membantah konsep yang ditawarkan. Hal ini terlihat manifestasinya dalam berbagai lembaga dan kegiatan yang terorganisir lainnya di desa. Untuk me mimpin suatu lembaga atau organisasi biasanya dipilih orang yang lebih tua, misalnya dalam hal pemilihan kepala desa. Di satu pihak hirarki yang demikian dapat mem - percepat lajunya pembangunan karena adanya kepenurutan dan kepatuhan terhadap pimpinan. Di lain pihak keadaan

yang demikian dapat menghambat pembangunan, karena su - lit untuk menempatkan seseorang sebagai pimpinan sesuai dengan keahliannya. Padahal zaman modern sudah menuntut spesialasisi dalam kepemimpinan. Selain dari itu hirarki yang tajam berdasarkan pola patenalistik dapat mematikan kreatifitas dan rasa tanggung jawab.

d. Norma Sistem Sosial

Norma sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat juga dapat menimbulkan masalah dalam pembangunan masyarakat desa. Para pakar mengemukakan dua pasangan norma sistem sistem sosial yang berlawanan yang disebut de - ngan 'polar types' untuk menganalisa tingkah laku yang terjadi dalam sistem sosial. Kedua norma sistem sosial yang berlawanan itu ialah norma sistem modern dan tradisional. Yang pertama mempercepat lajunya pembangunan, sedangkan yang kedua menghambat lajunya pembangunan. Masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendir seperti dikemukakan oleh Rogers, sebagai berikut:

1) Norma sistem sosial modern, ciri-cirinya adalah:

a) pada umumnya mempunyai sikap positif terhadap pero - bahan.
b) teknologinya sudah maju dengan sistem pembagian kerja yang kompleks.
c) pendidikan dan ilmu pengetahuan dinilai tinggi.
d) hubungan sosial lebih bersifat rasional dan bisnis daripada bersifat emosional.
e) pemandangannya kosmopolit, karena anggota sistem sering berhubungan dengan orang luar, mudah memasukkan konsep-konsep pembaruan ke dalam sistem sosialnya.
f) anggata sistem sosial mampu berempathi, dapat meng - hayati peranan orang lain yang betul-betul berbeda dengan dirinya sendiri.

2) Norma Sistem Sosial Tradisional, ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

a) kurang berorientasi pada perobahan.
b) kurang maju dalam teknologi atau masih sederhana
c) relatif rendah kemelek hurufan, pendidikan dan pema - hamannya terhadap metoda ilmiah.
d) hubungan interpersonal masih sangat efektif, sehingga mempermudah kekangan masyarakat untuk tetap mempertahankan status quo dalam sistem sosial; hubungan in - terpersonal yang seefektif itu tampak dalam bentuk persahabatan dan saling berkunjung yang dinilai tinggi sebagai tujuan mereka sendiri.
e) sedikit sekali komunikasi yang dilakukan oleh anggota sistem dengan pihak luar. Kurangnya fasilitas trans - portasi dan komunikasi dengan masyarakat yang lebih luas menyebabkan lebeih kuatnya kecenderungan orang-orang dalam sistem tradisional itu untuk relatif te - tap terisolir.
f) Kurang mampu menempatkan diri atau melihat dirinya dalam peranan orang lain, terutama peranan orang di luar sistem. Seorang anggota sistem dengan norma tradisional agaknya sulit atau tidak belajar dari hubung an sosial baru yang melibatkan diri mereka sendiri; dia biasanya hanya memainkan satu peranan tertentu dan tidak pernah memperlajari peranan-peranan yang lainnya.

2. Faktor Alam

Faktor alam merupakan faktor penting dalam pembangunan desa. Hal-hal yang temasuk ke dalam faktor alam ini antara lain: batas dan luas, jumlah penduduk, bentuk daratan, keadaan iklim, tingkat kesuburan, variasi jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di desa tersebut.

a. Batas dan Luas Desa

Yang dimaksud dengan batas dan luas desa di sini adalah batas dan luas desa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Oleh karena batas dan luas daerah alam pedesaan dapat menjadi faktor, salah satu unsur kelancaran pembangunan atau penghambatnya. Dikatakan demikian oleh karena semakin luas suatu desa, maka semakin luas pula - lah daerah pertanian, semakin luas daerah pertanian se - makin banyaklah hasil bumi yang dapat digali dan semakin besarlah penghasilan perkapita penduduknya. Besarnya hasil perkapita mempengaruhi ketenangan anggota masyarakat untuk diajak membangun. Penghasilan perkapita yang besar berpengaruh kepada kesempatan pendidikan, sebab walau bagaimana pun pendidikan menuntut biaya. Mereka tidak terlalu dikejar-kejar oleh rasa kekurangan sandang dan pangan. Dengan demikian proses pembangunan menjadi lebih lancar, sebaliknya makin miskin masyarakat suatu desa semakin sulit untuk melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan pisik.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang dapat menjadi permasalah dalam pembangunan masyarakat desa adalah tidak sebandingnya antara jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk yang tidak produktif. Akibatnya penduduk yang produktif menanggung beban yang berat, sehingga keadaan yang demikian mempersulit dirinya untuk meningkatkan taraf hidup.

c. Bentuk dan Keadaan Daerah

Dari segi bentu dan keadaan daerah dapat juga mem - pengaruhi kelancaran pembangunan. Keadaan daerah ini dapat berupa daerah pantai, dataran dan daerah bergunung - gunung. Keadaan daerah yang demikian mempengaruhi perwatakan penduduk, mereka yang tinggal di daerah pantai,

mereka yang tinggal di daerah yang datar dan mereka yang tinggal di daerah yang bergunung-gunung masing-masingnya akan mempunyai karakter yang berbeda. Adanya perbedaan karakter ini akan membawa pengaruh besar bagai kelancaran pembangunan. Oleh karena itu keadaan alam perlu diketahui terlebih dahulu sebelum merancang suatu program pembangunan desa.

d. Keadaan Iklim

Daerah yang beriklim panas berbeda karakter penduduknya dengan daerah yang beriklim dingin. Daerah yang mendapat durah hujan yang lebih banyak akan berbeda karakter penduduknya dengan dengan daerah yang mendapat curah hujan yang sedikit. Oleh karena perbedaan yang demikian diperlukan pula perbedaan pendekatan dalam menggerakkan pembangunan masyarakat desa pada masing-masing daerah. Di samping itu banyak sedikitnya curah hujan berpengaruh terhadap produksi pertanian, berbeda tingkat produksi ini akan membedakan pula tingkat penghasilan, sehingga berbeda pula permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. Dengan demikian keadaan iklim mempengaruhi kelancaran pembangunan, apakah dia akan memperlancar atau sebaliknya.

e. Tingkat Kesuburan

Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, tingkat kesuburan tanah akan sangat mempengaruhinya. Sebab sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa iklim berpengaruh kepada tingkat kesuburan tanah, di samping kualitas tanah yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pemikiran mengenai ketepatan jenis tanaman yang akan dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ketepatan pemanfaatan kualitas tanah menjadi masalah pedesaan yang besar pengaruhnya bagi kelancaran pembangunan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

3. Faktor Pengaruh Kota

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat desa juga dipengaruh oleh jauh-dekat atau lancar-tidaknya trans - portasi dari dan ke desa - kota. Berbagai aspek kehidup- an masyarakat desa dapat dipengaruhi oleh jauh dekatnya jarak kota dengan desa, terutama sekali dalam perkembang an dan kegiatan ekonomi.

a. Bagi Perkembangan Ekonomi

Jauh dekatnya jarak desa dengan kota akan mempenga- ruhi perkembangan ekonomi desa, turun naiknya nilai ko - moditi di suatu kota yang berdekatan mempengaruhi pula turun naiknya harga komoditi yang ada di desa. Selain daripada itu, pemasaran produksi desa, terutama produksi pertanian akan menjadi mudah. Faktor pemasaran sangat mempengaruhi gairah berproduksi, terutama produksi tani. Tidak jarang pada suatu desa faktor pemasaran mempenga - ruhi kemajuan tingkat kesejahteraan, sebab meskipun me- reka produktif, tapi tingkat produksi yang tinggi tidak begitu mempengaruhi tingkat kehidupan karena sulitnya pemasaran. Dengan demikian dapat dikatakan perkembangan ekonomi mandek.

b. Bagi Kegiatan Ekonomi

Jauh dekatnya jarak kota dengan desa mempengaruhi perkembangan ekonomi, perkembangan ekonomi akan mening - katkan frekuensi kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini meningkatkan penghasilan masyarakat, meningkatnya penghasilan meningkat pula kebutuhan hidup, akhirnya pe- ningkatan kebutuhan hidup akan meningkatkan pula freku - ensi kegiatan ekonomi. Sebab dengan kebutuhan yang ba - nyak semakin banyak pula kegiatan ekonomi yang diperlu - kan. Misalnya karena penghasilan meningkat, masyarakat

mampu membangun rumah, untuk itu mereka memerlukan tukang. Di samping itu mereka memerlukan batu bata, sehingga di - perlu orang yang berusaha memproduksi batu bata. Atau dengan mingkatnya penghasilan mereka merasakan perlunya listrik sebagai alat penerangan, misalnya dengan membeli generator listrik secara kolektif, dengan ada listrik mereka dapat pula memanfaatkannya untuk industri rumah tang ga, misalnya dengan membuat es. Dengan demikian jelaslah bahwa perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh jauh dekatnya kota dengan desa akan mempengaruhi pula frekuensi kegiatan ekonomi.

4. Faktor Prasarana/Sarana

Prasarana/sarana sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan desa, prasarana/sarana ini meliputi perhu - bungan, produksi dan pemasaran. Meskipun jarak antara kota dengan dengan desa relatif dekat, tapi tanpa sarana transportasi yang memadai, jarak ini tidak berpengaruh banyak bagi perkembangan dan kemajuan desa. Begitu juga halnya dengan sarana produksi dan pemasaran. Dalam hal ini dapat dikemukakan kasus desa -desa di sekitar Jawa Barat yang relatif mempunyai jarak yang dekat dengan kota, bahkan dengan ibu kota sekali pun. Bahwa sarana produksi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan desa , berikut ini dapat dikemukakan laporan Harian Kompas tang gal 12 Januari 1989, sebagai berikut:

> Memang justru dugaan sementara, yang seakan memperlihatkan keunggulan Jawa Barat secara keseluruhan itu, ternyata banyak yang meleset untuk melihat Periangan Timur bagian selatan. Misalnya, keadaan geografis atau pun kelnacaran transportasinya, Sela - tan, ternyata tidak mendukung seperti gambaran se - mual.
>
> . . . Barangkali dapat juga dipahami alasan keter -

ceceran pertanian di Jawa Barat Selatan khususnya. Sebab seperti dikemukakan Soeryo Adiwibowo, seo - rang peneliti pada pusat penelitian Lingkungan Hi- dup IPB, bahkan Jawa Barat sebetulnya baru terle - pas dari budaya ladang berpindah-pindah tahun 1940 an. Mungkin kita terperanjat karena beranggapan hal semacam itu tidak masuk akal terjadi di Jawa. Tetapi sesungguhnya, pernyataan itu pun harus de - ngan pengecualian. Sebab di daerah Jonggol, di ka- wasan selatan Bogor, praktek semacam ini--yang di kawasan ini kerap di sebut huma blok--bahkan masih berlangsung sampai sekarang"

Selanjutnya dapat pula dikutip laporan harian yang sama tentang Jawa Barat yang menunjukkan bahwa keterba- tasan sarana pemasaran sungguh menghambat pembangunan desa, sebagai berikut:

"Tapi pergilah ke pantai-pantai selatan Periangan Timur. Syukur lagi jika di dekat-dekat hari raya lebaran. Anda akan melihat betapa banyak pisang, kelapa, atau pun jagung bergeletakan tidak ada yang mengambil. Atau anda akan melihat betapa dari harga berbagai hasil ladang dan laut yang jadi ke- butuhan sehari-hari anda, mereka hanya mendapatkan sepersekiannya. Harga pisang, misalnya, bisa sam - pai hanya seperduapuluh harga yang anda bayar di pasar kota.

. . . . . Penelitian BPS bahkan memperlihatkan, ni lai tukar petani di Jawa Barat cenderung lebih ren dah, misalnya saja di banding Jawa Tengah. Pada hal praduga sementara memperlihatkan, beberapa fak tor seperti keadaan geografis, kelancaran trans - portasi, berbagai fasilitas, atau pun kedekatan dengan Ibu Kota, seakan mendukung ke arah sebalik-

nya. Itulah salah satu kecurigaan Ir. Kurnia Mah - mud, Ketua Bappeda Subang.

Keadaan barang mengejar uang ini, di Jawa Barat kurang terantisipasi dengan baik, karena kurangnya budaya pasar. Menurut pengamatan sementara di Jawa Barat memang bukannya tidak ada pasar, tapi jaring annya tidak mengakar sampai ke desa-desa kecil, seperti adanya pasar mingguan (giliran) di desa - desa Jawa Tengah, Jawa Timur atau Bali".

IV. PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN

1. Potensi Manusia dalam Pembangunan Masyarakat Desa

> Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. (Sekretariat Negara RI 1983, 43)

Memperhatikan konsep GBHN tentang faktor manusia sebagai modal dasar pembangunan dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia sekaligus adalah subjek dan objek pembangunan. Logikanya memang harus demikian, sebab tujuan pembangunan adalah untuk membangun manusia seutuhnya; dalam hal ini manusia. Selanjutnya menggerakan dan melaksanakan pembangunan adalah manusia. Jadi dengan demikian pembangunan adalah dari manusia untuk manusia, lebih luas lagi pembangunan masyarakat adalah dari masyarakat untuk masyarakat.

Berdasarkan konsep pemikiran di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, sebab pembangunan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan terdahulu adalah suatu proses yang ditumbuhkan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh anggota masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat yang, dan dengan kepercayaan sepenuh mungkin pada inisiatif masyarakat.

Menciptakan kondisi bagi kemajuan masyarakat oleh masyarakat hanyalah dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas manusia sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga jumlah manusia yang banyak dapat digunakan te-

naganya secara efektif. Berbicara tentang peningkatan kualitas manusia, berarti berbicara tentang pendidikan, sebab pendidikan pada hakekatnya adalah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia

2. Membangun Manusia melalui Pendidikan

Sesuai dengan bahasan terdahulu bahwa pada hakekatnya pembangunan itu adalah pembangunan dari manusia untuk kemanusiaan, manusia sekaligus jadi subjek dan objek pembangunan. Selaku subjek atau penggerak pembangunan, maka langkah awal dari pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia. Peningkatan kualitas manusia ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Sebab secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk membangun manusia yang harmonis sesuai dengan harkat kemanusiaan. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan yang pada akhirnya dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan nasional.

a. Membangun Kepribadian Manusia yang Harmonis

Segenap bangsa Indonesia sepakat bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk membangun manusia seutuhnya, yakni pembangunan manusia yang sesuai dengan harkat kemanusiaan. Oleh karena itu pembangunan adalah merupakan ikhtiar untuk hidup dan kehidupan manusia, tegasnya pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan. Pembangunan haruslah pembangunan yang berwatak kemanusiaan.

Pembangunan yang berwatak kemanusiaan adalah pembangunan yang mengutamakan harkat dan martabat manusia, sehingga pembangunan itu bercirikan untuk kepentingan

manusia. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicapai haruslah merupakan suatu hal yang utuh, sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila dan makhluk Tuhan.

1) Manusia sebagai makhluk individu. Sebagaik makhluk individu manusia harus dipandang sebagai suatu kepribadian yang unik, tidak ada duanya, antara satu dengan yang lain saling berbeda dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu pembangunan manusia sebagai makhluk individu perlu mendapat perhatian dari segi perbedaannya tersebut, meskipun ada hal yang universal yang harus dikembangkan pada setiap manusia, namun dengan tidak melupakan ciri khas atau kepribadian masing-masing individu.

2) Manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya pribadi manusia tidak sanggup hidup sendiri tanpa ada ada manusia lain, meskipun ia dapat hidup tanpa manusia lain, mungkin dia hanya dapat hidup pada tingkat vegetatif saja. Oleh karena itu pengembangan atau proses sosialisasi perlu mendapat perhatian yang tinggi sehingga dia dengan mudah dapat berintegrasi dan berinteraksi dengan manusia lain.

3) Manusia sebagai makhluk susila. Manusia dilahirkan dengan bawaan dan kemampuan untuk menciptakan dan merasakan keindahan. Tanpa kemampuan untuk menciptakan dan merasakan keindahan kehidupan akan monoton dan hambar.

4) Manusia sebagai makhluk Tuhan. Pada dsarnya manusia adalah makhluk yang lemah dan serba terbatas, dalam segala keterbatasannya ini pada akhirnya manusia akan mengadu pada Tuhannya. Oleh karena itu pengembangan manusia tanpa ke-Tuhanan akan membuat manusia mudah terombang-ambing, karena tidak ada tempat untuk mengem-

balikan hal-hal yang di luar kemampuannya.

Apabila semua aspek tersebut di atas dapat dikembangkan, maka terciptalah pribadi yang harmonis. Pembentukan pribadi yang demikian dapat dilakukan melalui pendidikan. Dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa kegiatan pendidikan itu dapat diarahkan pada pembentukan kepribadian manusia, yaitu:

a) Pengembangan manusia sebagai makhluk individu.
b) Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial.
c) Pengembangan manusia sebagai makhluk susila.
d) Pengembangan manusia sebagai makhluk religius.

Dengan demikian jelaslah bahwa melalui pendidikan dapat dibangun kepribadian yang harmonis.

b. Membangun Manusia yang Cerdas dan Terampil

Di antara tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Praktis dan teoritis tujuan ini dapat dan memang harus dicapai. Secara teoritis dapat dikemukakan bahasan sebagai berikut:

1) Pendidikan kecerdasan. Mengingat bahwa kecerdasan itu bukanlah hal yang timbul tanpa sebab, maka suasana pendidikan menyuburkan perkembangan kecerdasan. Perkembangan ini dimungkinkan karena proses berfikir itu melewati beberapa tingkat, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Bernadib:

a) Memperoleh penerangan atau fakta. Dengan persepsi indra dapatlah dikenal adanya penerangan atau fakta tersebut, yang demikianlah ditangkap bahan untuk berfikir.
b) Meningkat pada pembentukan paham, antara lain dengan mengadakan pengaturan data yang telah diketahui, dan dengan menentukan garis hubungan antara data tersebut. Jika paham yang tepat mengenai sesuatu telah

dapat dikembangkan, orang dapat berfikir sekejap mata.

c) Penerapan pengetahuan dalam situasi hidup nyata. Usaha nyata dalam hal ini dapat dalam bentuk pemecahan problem dengan sukses.

Proses berfikir yang demikian memang selalu dikembangkan dalam lembaga pendidikan.

2) Meningkatkan keterampilan. Keterampilan adalah merupakan sesuatu yang dapat diperoleh melalui usaha belajar, sedangkan belajar adalah merupakan bagian dari kegiatan pendidikan. Maka dengan demikian peningkatan keterampilan memang dapat dilakukan melalui usaha pendidikan.

c. Produk Lembaga Pendidikan sebagai Penggerak Pembangunan

Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manusia yang berkualitas tinggi adalah manusia yang mempunyai kepribadian yang harmonis serta memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi, semuanya itu diperoleh melalui usaha pendidikan.

Tanpa modal kemampuan dan kepribadian yang harmonis, serta kecerdasan dan keterampilan yang tinggi dan tangguh dari para pemikir, perencana dan pengawas pembangunan, bisa dibayangkan bagaimana jadinya usaha-usaha atau gerakan pembangunan nasional di suatu negara atau bangsa. Lebih dari itu, apa jadinya nasib bangsa, negara dan tanah air, jikalau mandeknya pembinaan dan pengembangan penerima estafet di dalam tekno struktur kehidupan berbangsa dan bernegara ?. Itulah salah satu tantangan yang musti dijawab oleh dunia pendidikan. Tantangan tersebut meminta lahirnya usaha-usaha pendidikan yang funsional untuk melahirkan pemikir, perencana dan pengelola pembangunan di segala bidang. Istilah fungsional tersebut konotasinya bukan sekedar pada aspek-aspek kemampuan teknis, tapi ju-

ga menyangkut sikap-sikap positif kunstruktif seperti: dedikasi, ketekunan, kedisiplinan, penuh inisiatif, tidak gampang putus asa, adil, jujur, bertanggung jawab, komunikatif persuasif, kritis dan terbuka yang semuanya tentu dimiliki oleh manusia dengan kepribadian sempurna, cerdas dan terampil.

V. PENDIDIKAN DI DESA DAN MASALAHNYA

Untuk membangun desa diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan ketrampilan. Sesuai dengan prinsip pembangunan masyarakat desa, sedapat mungkin yang membangun desa itu adalah masyarakat desa sendiri. Agar mereka dapat membangun dirinya sendiri, mereka perlu di didik. Pendidikan memang telah berlangsung di desa, baik melalui sistem persekolahan--paling tidak sampai tingkat SD--maupun pendidikan luar sekolah ataupun pendidikan informal yang penulis istilahkan sebagai pendidikan keseharian. Namun semua sistem pendidikan terse - but bukannya tidak mengalami berbagai permasalahan.

1. Pendidikan Persekolahan

Untuk saat ini sudah dapat dikatakan bahwa pendi - dikan persekolahan tersedia di seluruh desa dalam wilayah negara Republik Indonesia, yakni pendidikan yang dilaksanakan dalam sistem persekolahan. Pendidikan terstandar dengan sedemikian rupa dalam wujud legalitas formal yang mengikat dengan relatif ketat jika diban - dingkan dengan sistem pendidikan luar sekolah.

Keketatan formalitas dalam pendidikan persekolahan ini terlihat dalam cara sistem penyampaian yang dilem - bagakan secara ketat dalam bentuk perguruan dengan nama sekolah atau universitas dan institut, adalah merupakan fenomena modern. Ia merupakan responsi yang wajar dari pada pertumbuhan yang beragam dan meluas dari pada ma - syarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkelanjutan.

Ciri-ciri dan sifat pendidikan luar sekolah pada umumnya, sebagian atau seluruhnya terdapat pula pada pendidikan persekolahan. Tetapi ciri khas pendidikan

MILIK UPT PERPUSTAKA...
IKIP PADANG

persekolahan yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh sistem pendidikan luar sekolah adalah adanya penjenjangan kronologis yang ketat untuk tingkatan-tingkatan umur populasi sasarannya dan menurut tingkat pengetahuan dan keterampilan. Hal ini jelas tercermin pada penjenjangan yang mengatur sistem penyampaian dari taman kanak-kanak sampai kepada perguruan tinggi, yang masing-masing jenjang menerima kelompok umur tertentu dan memberikan pengetahuan serta keterampilan tingkat tertentu.

Oleh karena sistemnya itu pendidikan persekolah belum dan tidak akan mampu untuk menanggulangi masalah dan kebutuhan pendidikan di desa. Terutama dalam zaman yang selalu berobah dan menuntut penyesuaian baru, tidak akan ada suatu lembaga pendidikan persekolahan yang mampu benar-benar menyiapkan lulusannya untuk siap bekerja, melainkan akan menuntut selalu penyesuaian-penyesuan, begitu juga halnya pada sekolah-sekolah yang terdapat di desa. Lebih-lebih sistem pendidikan kita sekarang yang telah disinyalir kurang sesuai dengan kebutuhan zaman pembangunan dan kurang mampu menanggulangi masalah-masalah pendidikan dalam konteks perkembangan masyarakat luas. Pendidikan sekolah terutama akan tepat untuk mendapat peranan pembinaan umum sebagai dasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Perinsip pendidikan seumur hidup membawa inplikasi bagai pendidikan persekolahan untuk menyusun program pendidikan dan menghasilkan anak-anak didik untuk mampu berkembang lebih lanjut dengan inisiatif sendiri.

Karena makin kompleksnya kehidupan masyarakat, makin luas dan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan disekolah harus memilih bidang-bidang yang tidak mungkin dilakukan melalui proses pendidikan di luar sekolah dan sebaliknya. Ini terutama kare-

na kita tidak mungkin memperpanjang waktu sekolah, karena kalaupun kita perpanjang tidak mungkin bahan-bahan dan perobahan-perobahan diintegrasikan dalam program pendidikan di persekolahan. Karena itu kegiatan-kegiatan pendidikan yang tidak mungkin ditampung dalam program pendidikan persekolahan perlu ditampung dalam wadah pendidikan lain. Demikian keterbatasan dan masalah penddikan persekolahan karena sistemnya, keadaannya akan sama meskipun tempatnya berada di desa atau di kota.

Selain dari pada itu out put pendidikan persekolahan--mungkin juga akibat sistemnya--cenderung untuk meninggalkan desanya, mereka lebih senang mencari pekerjaan di kota. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan persekolahan gagal dalam merobah sikap mental anak didiknya. Sikap mental priyayi seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu masih melekat pada diri mereka. Lihatlah betapa banyaknya out put pendidikan persekolahan yang tidak lagi menghargai kerja keras, pekerjaan sebagai petani, mereka lebih senang menjadi pegawai. Padahal hasil pendidikan yang diharapkan dari mereka adalah untuk mampu memanfaat segala potensi yang tersedia di lingkungan mereka, misalnya menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka meiliki dalam bidang pertanian.

2. Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang persyaratan pemberi dan penerima pendidikannya lebih lentur dibandingkan dengan sistem pendidikan persekolahan. Pendidikan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dirasakan keperluannya dan mendesak, sehingga persyaratan pemberian pendidikannya tidak begitu ketat, begitu juga penerima pendidikan tidak perlu terlalu terikat oleh latar belakang pendidikan dan usia dengan mate-

ri pelajaran dan latihan yang disesuaikan dengan kebu - tuhan sasaran didik.

Arti dan makna keberadaan pendidikan ~~ini~~ luar se - kolah ini semakin dirasakan dengan berobahnya masyara - kat menjadi semakin kompleks, dengan terbukannya berbagai bentuk pekerjaan sesuai dengan lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, maka makin terasalah kebutuhan ma - syarakat untuk mengatur atau mengorganisir pelimpahan warisan-warisan sosial budaya secara lebih efisien dan dan efektif serta relevan dengan kebutuhannya. Maka selanjutnya lahirlah usaha pendidikan yang semakin diformalisir, meskipun belum formal betul dengan disertai persyaratan-persyaratan tertentu meskipun belum ketat betul. Semakin hari semakin dirsakan bahaw keperluan barang rumah tangga semakin banyak, sehingga memerlukan orang-orang yang khusus untuk mengerjakan itu. Makin besar keperluan masyarakat, makin besar pula keperluan akan tenaga-tenaga tukang dalam berbagai bentuk kete - rampilan. Dengan demikian masyarakat bukan hanya memerlukan orang yang memapu dalam produksi barang dan jasa, tapi juga memerlukan orang yang pandai untuk melatih orang lain untuk pandai dalam produksi barang dan jasa. Oleh karena itu pendidikan luar sekolah diperlu dan dilaksanakan di berbagai tempat, temasuk di desa.

Dengan demikian sistem pendikan luar sekolah sebenarnya cocok sekali untuk menjawab tantangan pembangunan masyarakat desa. Namun pendidikan luar sekolah bu - kanya tidak mempunyai permasalah di desa. Permasalahan ini lebih banyak dalam hal pengelolaannya, dalam pembinaan dan pengembangannya. Dalam soal pembinaan dan pe - ngembangan tersebut, jelas pendidikan luar sekolah agak terlantar, hal ini mungkin karena tervokusnya perhatian terhadap sistem pendidikan persekolahan, seolah-seolah pendidikan itu hasnya sekolah.

Barangkali karena sifatnya tidak begitu ketat dan mengikat, dia dapat tumbuh dengan sendirinya secara alami. Hal ini pulalah kiranya yang membuat pendidikan luar sekolah sering terlupakan dalam pembinaan dan pengembangannya. Begitu orang sadar akan pentingnya peranan pend dikan luar sekolah dalam mempercepat laju pembangunan, semua pihak berebut untu mengelolanya. Akibatnya malah menimbulkan masalah berupa topang tindihnya kebijakan dalam hal pelaksanaan dan perencanaan pendidikan ini.

Sering terjadi tupang tindih dan kurang koordinasi, bersera-serakkan yang saling berlawanan arah, sering kali juga kurang peka atau kurang terarah pada kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang mendesak, program pendidikan yang memerlukan tindak lanjut juga sering kali tidak disertai dengan gerakan-gerakan tindak lanjut, pokoknya kurang efisien, kurang efektif, kurang sistematis, kurang terarah dan kurang terpadu.

Selain dari pada itu, juga masih belum terdapat kesamaan bahasa, baik tentang konsep mau pun penyikapan terhadap pendidikan luar sekolah. Walaupun demikian pendidikanluar sekolah tetap masih terlaksana di desa, baik disadari atau tidak bahwa pendidikan yang dilaksana itu sebenarnya pendidikan luar sekolah.

3. Pendidikan Keseharian

Di sadari atau tidak pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang hidup manusia. Begitu juga keadaannya di desa, pendidikan dalam kehidupan manusia telah berlangsung dan akan tetap berlangsung meskipun orang-orang tidak menyadari bahwa proses pendidikan sedang berlangsung. Oleh karena itu pendidikan ini dikatakan sebagai pendidikan keseharian. Sebab pendidikan ini berlansung sepanjang hidup, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat,

oleh karena itu dia tidak diorganisir secara struktural dan tidak mempunyai jenjang kronologis, baik menurut tingkatan umur apalagi menurut tingkatan pengetahuan dan keterampilan. Istilah lain untuk pendidikan ini ialah pendidikan informal.

Pendidikan keseharian paling banyak dan paling luas kegiatannya. Ia meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai dan cara hidup serta kehidupan pada umumnya. Sasarannya tidak hanya kategori sosial tertentu dari kelompok umur tertentu saja, tapi semua ketegori sosial dan semua kelompok usia. Pendidikan ini tidak harus berlangsung pada jam, hari, bulan, atau tahun tertentu, tapi terjadi setiap saat ada manusia yang bermaksud secara sadar dan bermakna, baik dengan bertatap muka ataupun dengan perantaraan media komunikasi. Pendidikan ini berlangsung secara paling wajar sepanjang hidup manusia.

Sementara itu sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan keseharian (informal) merupakan pendidikan yang bertujuan, kadang-kadang berlangsung demgan resmi dan dengan sanksi sosial, terutama sanksi oleh keluarga atau kelompok pergaulan primer lainnya, sepanjang umur seseorang dan sepanjang peradaban manusia masih berlangsung, dapat mempunyai tata dan prosedur tertentu, mengikuti metode dan teknik tertentu, dia pun dapat terjadi di sekolah di luar tujuan-tujuan pendidikan persekolahan.

Oleh karena pendidikan keseharian tidak diorganisir secara struktural dan tidak mengenal jenjang kronologis menurut umur apalagi menurut tingkatan pengetahuan dan keterampilan serta tidak mengenal batasan waktu dan tempat, dia lebih merupakan hasil pengalaman belajar indi - vidual mandiri.

Sehubungan dengan ciri-ciri pendidikan keseharian tersebut, maka terlaksananya pendidikan ini tidak mung -

kin dikontrol. Padahal sesuai dengan kemajuan dunia komunikasi, berbagai pesan dari berbagai penjuru dapat ditangkap oleh semua anggota masyarakat di desa melalui berbagai media, baik media cetak atau pun media elekronika. Hal ini ditambah lagi oleh makin terbukanya desa-desa dari keterisoliran, ketertutupan. Semua pesan, semua proses interaksi itu belum tentu cocok bagi perkembangan dan kemajuan desa yang bersangkutan. Keadaan yang demikian merupakan masalah-masalah pendidikan keseharian di desa.

VI. PEMBENAHAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Pada bab V telah dikemukakan bahwa semua sistem pendidikan pada dasarnya sudah dilaksanakan di desa. Namun semua sistem itu menghadapi berbagai permasalahan. Sistem persekolahan bermasalah karena keterbatasan sistemnya, pendidikan luar sekolah bermasalah karena pembinaannya yang belum terarah dan terpadu, sedangkan pendidikan keseharian bermasalah karena memang tidak mungkin untuk dikontrol sesuai dengan sifatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut kiranya akan lebih efektif pembenahan pendidikan luar sekolah di desa guna memacu lajunya pembangunan desa.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa alasan perlunya pembenahan pendidikan luar sekolah di desa, langkah-langkah pengembangannya, pelaksana, tenaga kependidikan, dan koordinator.

1. Pembenahan PLS dalam Memacu Pembangunan Desa

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai argumentasi perlunya pembinaan pendidikan luar sekolah (PLS) dalam rangka memacu lajunya pembangunan masyarakat desa. Pertama dengan memperhatikan masalah masyarakat desa itu sendiri, yakni banyaknya anak yang drop out serta banyak pemuda dan orang dewasa yang tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan persekolahan baik akibat kemiskinan atau pun karena ketidak betahan mengikuti pendidikan persekolahan. Kedua akibat keterbatasan pendidikan persekolahan yang dilaksanakan di desa itu sendiri. Ketiga akibat lajunya perkembangan teknologi komunikasi.

a. Permasalah Desa. Meskipun tingkat buta huruf di desa-desa Indonesia sudah dapat ditekan--berkat program kelompok belajar Paket 'A', atau berkat semakin luas kesempatan untuk memasuki lembaga pendidikan persekolahan

sampai dengan tingkat kemampuan baca tulis--namun bukan berati masalah pendidikan bagi masyarakat desa sudah tuntas. Sesuai dengan perobahan zaman, bekal kemampuan menulis dan membaca saja belumlah cukup bagi mereka,mereka memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat hidup wajar.

Mereka yang drop out SD, tamat SD, dan bahkan orang dewasa yang telah mempunyai pekerjaan sekali pun masih memerlukan pendidikan. Namun sehubungan dengan pandangan yang umum terhadap pendidikan dewasa ini, begitu juga halnya dengan masyarakat desa, begitu mereka keluar dari bangku pendidikan persekolahan mereka beranggapan pendidikan mereka sudah selesai. Padahal pendidikan itu tidak pernah terhenti.

Anggapan bahwa pendidikan pernah selesai atau tamat sebelum ajal seseorang datang mungkin lahir akibat terlalu hebatnya pendidikan persekolahan dalam pandang masyarakat. Apalagi ijasah lembaga pendidikan persekolahan memang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam memperoleh lapangan kerja dan perkembangan karirnya, khususnya pada lembaga pemerintahan. Padahal usia pendidikan luar sekolah sebenarnya jauh lebih tua daripada usia pendidikan persekolahan dan telah banyak menghasilkan orang-orang yang sukses, terutama sebelum zaman kemerdekaan. Bukankah kegiatan-kegiatan keagamaan di surau-surau dan langgar-langgar pada dasarnya telah menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, khususnya memengenai pendidikan agama. Kiranya potensi yang demikian dapat dikembangkan menjadi kegiatan pendidikan luar sekolah yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan masyarakat yang mendesak sesuai dengan tuntutan pembangunan.

b. Masalah Pendidikan Persekolahan. Banyak ahli sudah menyadari bahwa masalah kehidupan manusia pada umum

nya, apalagi masalah kehidupan di desa,tidak mungkin ditangani melalui sistem pendidikan persekolahan saja. Hal ini berkenaan dengan berbagai kelemahan yang terdapat pada sistem pendidikan persekolahan itu sendiri. Nurtain mengemukakan berbagai kelemahan sistem pendidikan persekolahan tersebut sebagai berikut:

1) Kurang relevannya pendidikan persekolahan dengan kebutuhan anak didik, masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Pendidikan yang tidak relevan ini terasa sekali di daerah pedesaan karena kurikulum yang disajikan kepada anak tidak dapat membekalai dirinya dengan keterampilan yang sangat diperlukan dalam masyarakat itu.
2) Kurangnya kesempatan belajar bagi setiap tingkat usia sekolah.
3) Kurang efektifnya sistem penyampaian pendidikan. Hal ini terutama disebabkan karena pendidikan terlalu menekankan pada cara-cara yang lazim dilakukan oleh sekolah dan kurang memanfaatkan prasarana-prasarana yang bukan pendidikan, seperti: tempat-tempat rekreasi, agama, kebudayaan, organisasi-organisasi sosial, perkmupulan pemuda, olah raga dan organisasi wanita.
4) Kurangnya muta pendidikan yang disebabkan bukan saja pada kurangnya mutu kebanyakan pengajar, mutu alat fasilitas dan sumber belajar, tetapi yang lebih penting, mutu pendidikan ini tergantung kepada besar kecilnya kemampuan anak didik untuk belajar, memecahkan masalah-masalah kehidupan.
5) Kurang berimbangnya alaokasi biaya yang diperuntukkan bagi daerah kota dan daerah desa. Akibatnya jutaan anak muda yang tidak mendapatkan kesempatan pendidi - di desa terabaikan, sementara jika ada anak-anak di-kota-kota yang tidak tertampung biasnya jumlanya sedi

kit dan cepat mendapatkan kritikan dari mass media dan biasanya hal ini cepat mendapat tanggapan.

Masalah-masalah pendidikan persekolahan di atas memerlukan pemedahan masalah melalui sistem pendidikan luar sekolah. Pemecahan pendidikan luar sekolah akan terasa semakin penting lagi jika ditambahkan dengan beberapa kelemahan pendidikan persekolahan lainnya, seperti terbatasnya populasi sasaran pendidikan persekolahan, tidak mampunya kurikulum sekolah memacu lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga kurikulum yang sekarang diperkirakan sudah cukup modern tetapi sewaktu anak meninggalkan bangku sekolah, kurikulum itu sudah ketinggalan zaman.

c. Kebutuhan Belajar. Banyak ahli sosiologi mengatakan bahwa makin maju suatu masyarakat, semakin banyak pula kebutuhan hidupnya, semain canggih pula cara yang diperlukan untuk memenuhinya. Untuk memperoleh cara yang canggih itu tentu saja diperlukan pendidikan, oleh karenanya semakin banyak dan tinggi pula kebutuhan pendidikan yang dirasakan. Dalam rangka memacu lajunya pembangunan masyarakat desa, keutuhan-kebutuhan pendi - dikan yang demikian perlu dipenuhi.

Untuk mampu menetapkan berbagai kebutuhan pendi - dikan di desa serta menentukan cara-cara pemenuhannya, orang pertama sekali harus mempunyai konsepsi yang jelas dan realistis mengenai kebutuhan belajar yang pokok dan yang kurang penting. Memang undang-undang dasar kita mengisyaratkan bahwa semua orang berhak memperoleh pendidikan, tapi dalam bentuk apa pendidikan itu seharusnya dilaksanakan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dan mempunyai nilai praktis. Untuk ini perlu pemikiran yang seksama bagi masing- masing desa, sebab masing-masing desa akan mempunyai ber-

bagai perbedaan. Namun kiranya kiranya kebutuhan pendi - dikan minimal dapat dirumuskan sebagaimana dikemukakan Coombs berikut ini:

Bingkisan pendidikan minimal bagi masyarakat desa minimal harus berisikan hal-hal berikut ini:

1) Sikap positif, terhadap kerjasama dan pertolongan dalam keluarga dan semua manusia, terhadap pekerjaan dan masyarakat serta pembangunan nasional, dan juga terhadap belajar yang tidak ada habisnya serta pengembangan nilai-nilai etis. Sikap positif ini harus terlihat dalam kelakuan sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat, pada waktu kerja dan sesama belajar.
2) Menguasai huruf dan angka secara fungsional, yaitu mencukupi untuk:
   a) Membaca dan mengerti suratkabar, siaran penyuluhan pertanian, kesehatan serta petunjuk-petunjuk 'bagaimana membuat sesuatu', atau petunjuk penggunaan suatu alat.
   b) Menulis surat yang dapat dimengerti pembacanya, misalnya teman atau kantor pemerintah.
   c) Mengerjakan hitungan-hitungan dan pengukuran-pengukuran tanah, gedung, menghitung ongkos dan laba pertanian, bunga suatu kredit atau sewa tanah.
3) Memiliki pandangan yang ilmiah serta mengerti proses-proses alam sekelilingnya, umpamanya dalam hubungan kesehatan dan sanitasi, cara bertani dan beternak, gizi, penimbunan pangan, pembuatan pangan, pemeliharaan alam sekitar, dan sebagainya.
4) Pengetahuan fungsional dan keterampilan bekeluarga serta memelihara keluarga, termasuk di dalamnya: melindungi kesehatan keluarga, keluarga berencana, pemeliharaan bayi dan anak, gizi dan sanitasi, kegiatan kebudayaan dan rekreasi, memelihara orang sakit dan

cedera, berbelanja dan menggunakan uang secara bijaksana; membuat pakaian dan lain-lain barang sehari-hari, membetulkan kerusakan rumah serta halaman; menanam kebutuhan makan untuk keluarga.

5) Pengetahuan fungsional serta keterampilan untuk mencari nafkah, tidak hanya untuk kebutuhan setempat, tetapi juga pengetahuan serta keterampilan pertanian dan hal-hal lain yang bukan pertanian.

6) Pengetahuan fungsional serta keterampilan agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk juga pengetahuan tentang sejarah nasional dan lokal, ideologi, mengerti masyarakatnya; memahami struktur pemerintahan serta fungsi-fungsinya; pajak dan pembelanjaan oleh pemerintah; layanan sosial yang tersedia; hak dan kewajiban warga negara, dasar, tujuan dan bekerja koperasi serta perkempulan-perkumpulan setempat.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang demikian, sesuai dengan sifatnya, kiranya pendidikan luar sekolah memang merupakan suatu sistem pendidikan yang mudah dan semestinya dilaksanakan di desa dengan intensif.

2. Langkah-langkah Pembinaan dan Pengembangan PLS

Dikarekan beragamnya jenis pendidikan luar sekolah yang mungkin dilaksanakan di desa sesuai dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan, tentu langkah-langkah pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah pada masing-masing desa tentu saja dapat pula mengalami perbedaan. Namun secara umum dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a) Penentuan Populasi Sasaran. Sesuai dengan sifat pendidikan luar sekolah, maka jika berbicara tentang populasi sasaran pendidikannya, maka opulasi sasaran itu akan mencakup semua warga masyarakat desa. Namun demiki-

an perbedaan populasi sasaran ini perlu mendapatkan perhatian, agar dengan demikian dapat dirancang program PLS yang sesuai dengan kebutuahan masyarakat.

Populasi sasaran PLS ini dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, sebagai berikut:

1) Berdasarkan usia. Berdasarkan usia, maka populasi sasaran pendidikan ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yakni: anak usia sekolah, pemuda dan orang dewasa. Pembedaan berdasarkan usia ini perlu mendapatkan perhatian dalam pembinaan dan pengembangan PLS. Sebab berdasarkan perbedaan usia akan terjadi perbedaan perkembangan sasaran didik, baik dalam arti psikologis, mau pun dalam arti sosial.

2) Berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin sasaran didik jelas hanya dua. Tetapi perbedaan ini perlu diperhitungkan dalam pembinaan dan pengembangan PLS. Bisa saja dalam suatu desa terdapat kebutuhan belajar yang pada hakekatnya merupakan kebutuhan semua masyarakat itu, tapi situasi mental, tradisi dan sikap lingkungan masyarakat tidak mengizinkannya untuk menyatukan sasaran didik yang berbeda jenis kelamin ini dalam suatu kegiatan pendidikan.

3) Perbedaan lingkungan sosial. Perbedaan lingkungan sosial pada berbagai desa dapat ditinjau dari segi mata pencariannya, misalnya sebagai masyarakat tani atau masyarakat nelayan, biasa juga dari sikap mental masyarakat itu pada umumnya. Tapi yang penting sekali ditekankan di sini adalah bahwa perbedaan lingkungan sosial ini akan menuntut jenis pendidikan yang berbeda pula. Perbedaan ini bukan hanya dalam bentuk perdaan jenis keterampilan saja, tapi dapat juga dalam aspek lain, misalnya sesuai dengan lingkungan sosial suatu masyarakat mungkin pendidikan yang perlu diberi

kan kepadanya adalah sanitasi atau konservasi tanah atau pun sikap mental.

4) Perbedaan latar belakang pekerjaan. Banyak orang berfikir bahwa pekerjaan masyarakat desa itu homogen, yakni sebagai petani, sehingga perbedaan latar belakang pekerjaan ini sering terlupakan dalam mempertimkan program pendidikan bagi masyarakat desa. Suatu hal yang harus dipertimbangkan dewasa ini adalah bahwa lahan pertanian sudah semakin menyempit, sehingga masyarakat desa memerlukan lapangan kerja yang bervariasi, misalnya penggalakan industri rumah tangga. Oleh sebab itu masyarakat desa setidaknya mempunyai tiga macam latar belakang pekerjaan; pertama yang belum mempunyai pekerjaan sama sekali dan tidak mempunyai bekal untuk itu, kedua sudah mempunyai bekal untuk bekerja tapi belum memadai, ketiga sudah mempunyai bekal keterampilan kerja tapi belum tersalur yang mungkin menyangkut dengan sikap mentalnya. Untuk populasi sasaran yang demikian diperlukan pula program pendidikan yang berbeda.

5) Perbedaan latar belakang pendidikan. Perbedaan latar belakang pendidikan di sini tidak hanya berdasarkan perbedaan latar belakang pendidikan persekolahan saja, tapi lebih jelimet lagi, yakni dengan memperhatikan kemampuan baca tulis, bahasa dan pengetahuan dasar. Sesuai dengan latar belakang tersebut dapat dirancang program pendidikan yang sesuai.

6) Perbedaan karena deviasi sosial. Populasi sasaran PLS dapat juga dibedakan dari segi terjadinya deviasi sosial dalam diri sasaran didik. Perbedaan ini misalnya akibat kenakalan, penyalah-gunaan obat (narkotika), bekas tahanan terutama sekali tahanan politik. Maka program pendidikan untuk masing-masing aspek penyimpangan ini juga harus berbeda.

b) Identifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat. Setelah populasi sasaran didik ditetapkan, selanjutnya dapat dilakukan identifikasi kebutuhan belajar populasi sasaran tersebut. Berdasarkan jenis populasi sasaran sebenarnya sudah dapat diketahui jenis-jenis program pendidikan yang relevan dengan populasi sasaran tersebut, baik berupa pengetahuan, keterampilan atau pun sikap. Namun demikian, meskipun populasi sudah digolongkan, dalam golongan yang sama akan tetap ditemukan perbedaan-perbedaan kebutuhan pendidikan. Lagi pula tidak semua kebutuhan pendidikan yang relevan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah identifikasi.

Dalam melakukan identifikasi dapat digunakan berbagai teknik, baik berdasarkan kebutuhan yang dirasakan atau pun tidak. Oleh karena itu dalam tindakan identifikasi diperlukan kejelimetan para peneliti untuk dapat membedakan antara kebutuhan yang bersifat umum dan kebutuhan yang bersifat khas, kebutuhan yang dirasakan langsung oleh warga masyarakat dan kebutuhan yang tidak dirasakan.

c) Identifikasi Sumber Belajar. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keunggulan sistem pendidikan luar sekolah adalah banyak dan mudahnya merekrut sumber belajar. Sumber belajar ini sangat bervariasi, tapi secara garis besarnya dapat digolongkan kepada sumber manusiawi dan non-manusiawi yang memberikan kemungkinan terjadinya kegiatan belajar pada masing-masing sasaran didik. Dalam mengidentifikasikan sumber belajar di samping bergerak dari soal ada atau tidaknya, sedikit atau banyaknya, perlu diperhitungkan kemungkinan pendayagunaannya. Dalam hal pendayagunaan ini perlu diperhitungkan persyaratan dalam pendayagunaannya.

Berkenaan dengan sumberdaya ini, lebih rinci Alia -

sar membedakannya pada empat jenis sebagai berikut:

1) Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dapat pula diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan luas dan kondisi suatu program. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:
   a) Orang di tingkat sumber dayanya sesuai dengan tujuan program (yang terlibat dalam proses belajar dengan program yang direncanakan), sebagai contoh: kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok pemuda yang putus sekolah, kelompok semi profesional tertentu dan sebagainya.
   b) Orang-orang yang diharapkan dapat mengorganisir program pendidikan luar sekolah itu. Sumber daya manusia yang tergolong ke dalam klassifikasi ini mungkin dapat dipilah-pilah lagi sesuai dengan bentuk struktur program, umpamanya steering comittee, organizing committee dan sebagainya. Sumberdaya manusia ini mungkin dapat ditemukan pada instansi-instansi pemerintah, tenaga sukarela, pemuka masyarakat dan sebagainya.
   c) Orang yang mungkin diharapkan akan dapat menjadi tutor atau instruktur. Untuk mendapatkan sumberdaya yang demikian mungkin bisa diharapkan dari instansi pemerintah, tenaga sukarela, para pensiuman, dan sebagainya.
2) Sumber material. Sumber material ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar masyarakat sendiri. Sumber material ini dapat pula digolongkan kepada tiga jenis, yakni:
   a) Material yang akan diolah, misalnya dalam bidang pertanian materialnya adalah lahan yang tersedia di desa.
   b) Sarana dan prasarana, misalnya sekolah-sekolah dapat dimanfaatkan di waktu sore atau rumah-rumah

ibadah.

c) Bahan-bahan bacaan, misalnya koran masuk desa, perpustakaan sekolah atau perpustakaan desa.

3) Sumber dana. Baik sumber dana yang memang dianggarkan oleh pemerintah ataupun sumbangan-sumbangan dari donator dan bahkan kemungkinan kemampuan warga belajar sendiri.

4) Sumber informasi. Sebelum menyusun informasi diperlukan informasi yang shahih, misalnya dari laporan penelitian, seminar, sensus, atau pun dari berbagai lembaga yang telah melaksanakan pendidikan luar sekolah.

d. Penyusunan Program. Berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, berikutnya dapat disusun program pendidikan yang dimaksud, minimal mencakup:

1) Rasional
2) Tujuan
3) Manfaat
4) Sasaran
5) Materi
6) Waktu/jadwal kegiatan
7) Pelaksana: a. pengelola
   b. tenaga teknis
8) Evaluasi kegiatan belajar

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

d. Evaluasi Program. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya dalam pembinaan dan pengembangan program PLS adalah kegiatan evaluasi program. Melalui evaluasi program ini dapat ditetapkan baik--kurang baiknya atau berhasil--kurang berhasilnya suatu program pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi ini selanjutnya dapat ditetapkan langkah-langkah pengembangan program berikutnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yang dikemukakan oleh Depdikbud, yaitu:

1) Untuk mengetahui apakah program pendidikan yang dikem-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

bangkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Untuk mengetahui bagaimana memperbaiki atau menyempurnakan program pendidikan itu dalam tahap-tahap pengembangannya.

3. Pelaksana PLS di Desa

Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa akhir-akhir ini banyak ahli mulai menyadari bahwa pendidikan luar sekolah akan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan nasional dan bahkan akan lebih relevan jika pendidikan ini lebih didayagunakan di desa sesuai dengan kondisi desa. Kesadaran ini terlihat dalam tindakan berbagai lembaga dan instansi yang sudah melaksanakan pendidikan luar sekolah, meskipun belum ada kesepakatan dan pengakuan apakah itu pendidikan luar sekolah atau tidak. Bahkan keadaan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan berupa topang tindihnya kebijakan. Tetapi harus diakui bahwa diantara berbagai lembaga tersebut memang relevan dan pantas untuk melaksanakan pendidikan luar sekolah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah:

a. Lembaga Persekolahan. Lembaga pendidikan persekolahan potensial untuk melaksanakan pendidikan luar sekolah, untuk ini dapat dikemukakan dua pertimbangan:

1) Basic Memorandum Mendikbud 1972, yang isinya antara lain menuntut sekolah di samping sebagai pusat kegiatan belajar anak dia harus juga berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat sekitarnya.

2) Keterbatasan kemampuan sekolah, terutama dalam hal muatan kurikulum yang belum mampu menampung semua aspek kebutuhan belajar anak. Oleh karena itu kiranya sekolah dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatan belajar yang tidak termasuk dalam muatan kurikulum, tapi sangat dibutuhkan oleh anak dalam memecahkan masalah-masalah yang aktual dalam kehidupannya.

b. Lembaga Diklusemas. Lembaga diklusemas ialah lembaga pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat. Diklusemas banyak tumbuh di kota-kota, menjamur dalam bentuk kursus-kursus. Barangkali sudah tiba waktunya lembaga-lembaga ini dirangsang perkembangannya sampai ke desa-desa.

c. Balai-balai Pendidikan dan Latihan. Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) di sadari atau tidak sebenarnya telah melaksanakan pendidikan luar sekolah. Dewasa ini sudah hampir semua instansi pemrintah mempunyai Diklat, tapi belum semua Diklat ini sampai masuk ke desa-desa dan belum semua diklat pula yang mencoba menjawab kebutuhan belajar masyarakat sesuai dengan relevansi instannya, program pendidikan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan intern instansi yang bersangkutan, kecual Departemen Tenaga Kerja dengan Balai Latihan Keterampilan (BLK)-nya. Persoalannya sekarang bagaimana mendayagunakan berbagai diklat tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat desa serta pengelolaan yang lebih profesional.

d. Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan telah pula melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan luar sekolah dengan versi mereka, terutama sekali dalam pengkaderan calon peimpin dalam berbagai lapangan kehidupan. Lembaga-lembaga organisasi kemasyarakat tersebut memang potensial untuk melaksanakannya, asal saja dengan pengelolaan yang profesional pula.

4. Tenaga Kependidikan

Bagaimanapun luwesnya suatu sistem pendidikan, dia akan tetap memerlukan tenaga kependidikan untuk itu. Dalam sistem persekolahan memang kuantitas dan kualifikasi guru sangat menentukan untuk dapat dilaksanakannya suatu kegiatan pendidikan. Dalam sistem pendidikan luar sekolah

masalah kualifikasi dan jumlah tidak begitu menentukan. Namun diperlukan tenaga yang mengelola atau setidaknya yang mengageni pelaksanaan pendidikan yang dimaksud.

Apa pun istilah yang digunakan bagai seseorang yang berkompeten manangani pendidikan luar sekolah, yang penting menurtu Faisal dia memiliki kemampuan minimal sebagai berikut:

a. Mampu mendiagnosa kebutuhan belajar masyarakat.
b. Mampu merancang strategi program belajar masyarakat.
c. Mampu menggalang dan mendinamisir program belajar masyarakat.
d. Mampu memonitor dan mengevaluasi program belajar masyarakat.
e. Mampu membimbing soal-soal metodologis kependidikan luar sekolah.

Selanjutnya masalah kopetensi dalam pengelolaan pendidikan luar sekolah dewasa ini perlu diperhatikan. Sebab ada kecenderungan pelaksanaan pendidikan luar sekolah tidak dikelola oleh orang-orang yang berkompeten. Pada semenjak dasa-warsa 1980-an hampir semua IKIP Negeri Indonesia menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan luar sekolah.

5. Koordinator

Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu bahwa pendidikan luar sekolah telah dilaksankan oleh banyak lembaga, namun masih tidak terkoordinir, mengakibatkan lahirnya berbagai kebijakan yang topang tindih dan membingungkan. Untuk ini diperlukan suatu lembaga koordinator tunggal, dalam hal ini Faisal mengajukan tiga alternatif sebagai koordinator, yakni:

a. Direktorat Pendidikan Masyarakat. Direktorat pendidikan masyarakat, dengan segala aparatnya ke bawah, di akui atau tidak, dia merupakan instansi pemerintah yang

paling banyak dan luas pengalamannya dalam seluk beluk PLS, relatif lebih mengenal asam garamya PLS. Berdasarkan pengalaman tersebut, rasanya cukup wajar bila kelembagaan pendidikan masyarakat pada Depdikbud dijadikan lembaga koodinator dari seluruh program PLS. Modal kesiapan yang dimiliki oleh lembaga tersebut untuk memainkan fungsi koordinasi.

b. Unit Baru dalam Struktur Depdagri. Kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten dan kotamadya sudah jelas memegang kunci koordinasi terhadap seluruh program pembangunan di lingkungan daerahnya masing-masing. Tangan seorang gubernur, seorang bupati atau seorang walikota, memiliki wibawa formal untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh aktifitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Atas dasar kekuatan koordinator tersebut, kiranya masuk akal pula kalau koordinasi program-program PLS juga ditangani langsung oleh aparat pemerintah daerah. Untuk itu, mungkin diperlukan suatu unit baru di dalam struktur Depdagri, suatu unit yang khusus menangani koordinasi terhadap seluruh program-program PLS.

c. Lembaga Baru Nondepartemen. Pilihan ke tiga ini, jelas-jelas diusulkan oleh Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam laporannya (baca: Sistem Pendidikan Nasional, Laporan Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional, 1980). Pilihan tersebut diusulkan, karena PLS yang memiliki jangkauan luas, tentu saja memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang kuat. Rekomendasi tersebut, memang mengena, khususnya untuk penggalangan pertama yang secara objektif memerlukan penangan yang sungguh-sungguh dan berkewibawaan.

VII. PRIORITAS PROGRAM PLS DI DESA

Sesuai dengan sifatnya, maka pendidikan luar seko - lah harus dan seharunya dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan masyarakat. Namun sesuai dengan populasi sasaran pendidikan yang telah dikemukakan terdahulu, sum - ber belajar, prasarana dan sarana serta prinsip pemenuhan kebutuhan pendidikan minimal, maka pendidikan luar sekolah yang akan diprogramkan perlu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Kiranya program PLS yang perlu diprioritaskan di desa-desa adalah: Kejar Paket 'A', Kejar Usaha, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pembinaan Generasi Muda, Kelompok-kelompok Tani, Kelom - pok Pembaca, Pendengar dan Pirsawan (Kelompencapir), dan wirid-wirid agama. Dewasa ini program pendidikan yang demikian dikelola oleh berbagai lembaga/instansi.

1. Kelompok Belajar (Kejar) Paket 'A'

Kejar Paket 'A' yang dilaksanakan dewasa ini adalah kegiatan belajar pendidikan dasar yang dipadukan dengan pendidikan mata pencarian. Pendidikan dasar ialah pendidikan yang memberikan seperangkat pengetahuan, keteram - pilan dan sikap kepada warga belajar yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Pendidikan mata pencarian ialah pendidikan yang memberikan sperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada warga belajar untuk mengusahakan mata pencarian sebagai sumber nafkah penghidupannya.

Dengan melaksanakan progaram ini, maka tidak ada lagi warga masyarakat yang belajar baca, tulis, hitung, semata-mata tanpa jelas kaitannya dengan pengusahaan mata pencarian yang menjadi sumber nafkah hidupnya. Tidak ada lagi warga masyarakat yang belajar tanpa ada sangkut

pautnya dengan usaha peningkatan pendapatan atau penghasilan. Program kejar Paket 'A' tidak hanya diarahkan untuk pemberantasan buta huruf semata-mata, melainkan diarahkan juga terhadap apa yang mesti dipelajari oleh warga masyarakat buta huruf itu agar pendapatannya atau tarag hidupnya meningkat.

Oleh karena itu kegiatan pendidikan ini perlu diarahkan agar warga belajar dapat mengolah berbagai kemungkinan sumber penghasilan dengan cara mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis mata pencarian yang dapat menghidupi warga masyarakat yang buta huruf. Langkah selanjutnya adalah menemukan unsur belajar yang dituntut dan disyaratkan untuk dapat mengolah dan mengusahakan mata pencarian tersebut.

Mata pelajaran dalam pemberantasan buta huruf gaya baru haruslah mata pelajaran yang disyaratkan dan diisyaratkan oleh mata pelajaran itu. Proses belajar yang dilaksanakan harus berseraga dan bersenyawa dengan proses pengolahan mata pencarian itu sendiri sebagai sumber pendapatan.

Memadukan pendidikan dasar dengan pendidikan mata pencarian adalah merupakan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan pendidikan. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman pada periode pemberantasan buta huruf, waktu itu amat susah untuk menggiatkan masyarakat guna belajar, karena tidak terkait dengan kebuthan hidup mereka secara langsung.

2. Kelompok Belajar (Kejar) Usaha

Kelompok belajar usaha adalah suatu kegiatan membelajarkan masyarakat untuk mengejar ketinggalan di bidang usaha dengan cara belajar, bekerja dan berusaha guna memperoleh suatu mata pencarian sebagai sumber penghasilan

tetap dan layak guna memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan taraf hidup mereka yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok belajar.

Kejar usaha bukanlah perusahan semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi usaha yang di dalam prosesnya terdapa unsur belajar, bekerja dan berusaha secara terintegrasi. Semua warga belajar merasa memiliki perusahaan tersebut, mereka bekerja, berusaha dan belajar bukanlah digaji oleh majikan, akan tetapi kegiatan dilakukan dengan kemauan sendiri, untuk kepentingan sendiri guna mengejar ketinggalan-ketinggalan mereka dalam bidang usaha.

Hal yang diperlajari adalah berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap yang diperlukan dalam rangka peningkatan produktifita, kualitas serta kemampuan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari.

Jika program kejar usaha dapat berjalan desuai dengan yang diharapkan, dapat diyakini bahwa program ini akan mempercepat lajunya pembangunan desa. Namun kiranya, motif warga belajar mengikuti kegiatan belajar ini berbeda-beda, tidak semuanya memasuki kegiatan belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha sesuai dengan program belajar yang direncanakan. Pada mula Kejar Usaha digalakkan, pemerintah memberikan modal yang tidak harus dikembalikan secara sempurna, kewajiban warga belajar hanya menyisihkan sebagain keuntungan dengan harapan keuntungan ini dapat digunakan sebagai modal bagi kelompok belajar usaha berikutnya. Akan tetapi ternyata penyisihan ini sering macet, akhir-akhir ini pemerintah tidak lagi memberikan modal dengan cara yang demikian kepada calon warga belajar, tapi modal diberikan bersifat pinjaman yang harus dibayar langsung melalui bank-bank yang ditunjuk berikut bunganya.

3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ini dilaksanakan oleh Departemen dalam Negeri. Pembinaan ini dikoordinasikan semenjak dari tingkat provinsi, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Pada tingkat desa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan oleh LKMD melalui seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini dapat digolongkan sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah, sebab memberikan bimbingan secara terarah kepada anggota keluarga, dengan memberikan pengertian/pengetahuan, merobah sikap serta tingkah laku agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga terwujudnya keluarga sejahtera.

PKK secara langsung dapat menyintuh setiap keluarga dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup untuk mempercepat proses terbentuknya masyarakat yang sejahtera di desa. Untuk itu PKK memerlukan suatu program yang terpadu yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang kesejahteraan keluarga.

4. Pembinaan Generasi Muda

Pemuda atau generasi muda merupakan tulang punggung pembangunan di desa, karena pemuda memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Mereka siap untuk memasuki dunia yang penuh dengan tanggung jawab sebagai orang dewasa, mereka siap untuk jadi pimpinan atau untuk memasuki berbagai lapangan kehidupan, asalkan mereka mendapatkan pembinaan yang sewajarnya.

Dilihat dari segi pembangunan desa, maka generasi muda merupakan potensi desa yang harus dibina sebaik-baiknya, untuk mengantarkan pemuda-pemuda desa ke masa depan generasi yang kuat, sehat, tangguh, bertanggung jawab, berketuhanan yang maha esa, cinta kepada tanah air, dan

mempunyai rasa kesatuan, demokratis, terampil serta memiliki pandangan yang rasional dan bermoral Pancasila.

Dari segi kebutuhan pembangunan desa, maka pemuda sebagai sumber tenaga kerja di masa datang dan sebagai sumber manusiawi yang potensial. Mereka perlu dipersiapkan untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan yang nyata dalam pembangunan desanya.

Dari aspek regenerasi, pembinaan generasi muda menjadi lebih penting, karena sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, pemuda harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar merupakan jaminan bagi kelangsungan pembangunan di desa masing-masing. Di samping ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam pembinaan generasi muda ini, yaitu hendaknya mereka tidak selalu di pandang sebagai objek, dan selalu diperhatikan dan diawasi melainkan juga harus dipandang sebagai subjek yang mampu berdiri sendiri setelah dibina. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Siagian,

> "Sebenarnya pemuda sebagai bagian dari warga masyarakat harus dipandang sebagai subjek, sehingga mereka mempunyai nilai-nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama".

Oleh karena itu yang harus diberikan bukanlah material, tetapi kebutuhan yang sebenarnya dari pemuda adalah motivasi, dorongan yang dapat membangkitkan semangat bekerja dan tidak tergantung kepada orang lain. Material tersebut tidak dapat bertahan lama. Sebab jika bantuan material itu tidak dapat dipakai lagi, mungkin saja gairah dan semangat kerjasama para pemuda akan luntur.

Sesungguhnyalah pemberian motivasi yang mendorong generasi untuk mau hidup bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bahkan kalau mungkin untuk mengambil over tanggung jawab generasi sebelumnya, adalah merupakan kegiatan

pendidikan luar sekolah. Namun perlu peningkatan program ke arah tingkat perencanaan dan keterpaduan yang memperlihatkan bahwa kegiatan itu mempunyai tahap-tahap pelaksanaan dalam jangka waktu tertentu secara kontinyu. Dengan demikian sempurnalah dia sebagai program pendidikan luar sekolah.

5. Kelompok Belajar Pertanian

Dewasa ini hampir pada semua desa ditemui plank - plank nama kelompok tani. Adanya plank nama ini menun - jukkan bahwa petani desa telah mulai bekerjasama secara lebih terorganisir. Tentu saja kerjasama ini bukan hanya sekedar saling membantu secara fisik, tapi lebih dari itu, dalam kerjsama terdapat saling pertukaran informasi dalam bentuk pengetahuan atau saling memberi dan menerima berbagai jenis keterampilan pertanian. Oleh karena itu kelompok tani sebenarnya merupakan wadah kegiatan belajar pertanian, atau dapat juga dikatakan sebagai kelompok belajar pertanian.

Kegiatan belajar dalam bidang pertanian telah di - rintis oleh Departemen Pertanian melalui Balai Latihan Kerja (BLK)-nya. Tapi kelihatannya pendidikan ini cenderung kepada sistem persekolahan, karena materi yang diberikan lebih banyak bersifat 'turun dari atas', artinya materi pelajaran sudah disiapkan dengan sedemikian rupa sesuai dengan program BLK. Selain dari pada itu daya jangkau BLK ini sangat terbatas untuk melayani seluruh desa. Oleh karena itu menjadikan kelompok tani sebagai wadah kegiatan belajar atau kelompok belajar pertanian, kiranya merupakan suatu hal yang penting bagi pembangunan desa.

Petani desa membutuhkan bantuan agar mereka dibim - bing untuk dapat menjadi perencana dan pengelola lahan

pertanian mereka dengan lebih terampil. Sebab usaha pertanian dewasa ini bukan hanya sekedar bagai mana dapat meningkatkan produksi tani sampai menjadi sekian kali lipat, tapi lebih dari itu. Pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan produksi panen saja tidak menjamin peningkatan kesejahteraan petani, khususnya petani kecil di pedesaan. Sudah saatnya petani diajar dan dibimbing untuk memandang lahan petanian sebagai suatu satuan ekonomi, perusahaan, dan bukan hanya sekedar upaya untuk menyambung hidup semata-mata. Makna dari prinsip lahan pertanian sebagai suatu kesatuan ekonomi adalah bahwa sudah tiba saatnya para petugas penyluh lapangan pertanian tidak hanya menjual teknologi baru dalam hal bercocok tanam saja lagi kepada petani.

Petani desa juga perlu diajar dan belajar tentang cara memperbaiki dan memelihara modalnya, misalnya dalam hal memelihara konservasi tanah, membuat dan memelihara perkakas kecil, merawat dan mengasuh ternak yang digunakan sebagai tenaga penggarap lahan, bahkan bagaimana memelihara kesehatan sipetani sendiri untuk dapat memperkondisi tubuh yang prima. Oleh karena itulah, pembinaan dan pengembangan kelompok tani sudah memerlukan penanganan secara lintas sektoral dari berbagai disiplin ilmu. Hal yang demikian mengharuskan kelompok tani untuk dikembangkan menjadi kelompok belajar pertanian yang sifatnya berkesinabungan untuk berbagai program jangka pendek.

6. Kelompencapir

Jika diartikan bahwa pesan-pesan yang disalurkan melalui media massa, apakah itu radio, koran/majalah/buletin/dan sebagainya serta televisi dapat memberikan sumbangan pada audiennya guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru serta mendatangkan perobahan sikap, maka

media ini sudah berfungsi sebagai sarana pendidikan. Se - lanjutnya jika para audien tadi berkumpul bersama secara terprogram untuk mendiskusikan berbagai informasi yang mereka peroleh agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan ini sudah dapat digolongkan sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu kegiatan ini perlu dikembangkan di desa dalam rangka me - macu lajunya pembangunan desa.

Di antara alasan yang mendorong perlunya pengembang- an kelompencapir sebagai sarana kegiatan belajar di desa adalah bahwa radio, koran dan televisi telah menjangkau hampir semua desa di Indonesia. Warga masyarakat tinggal memilih pesan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk didiskusikan dalam kelompok. Dalam kelompok mereka dapat belajar dan saling membelajarkan. Pada saat tertentu me- reka dapat meminta bantuan dari sumber belajar yang ter - sedia, baik dari anggota masyarakat itu sendiri atau pun dari petugas-petugas lembaga pemerintah yang relevan.

Selanjutnya Rogers mengemukakan bahwa kegiatan bela- jar dalam forum media (kelompencapir:penulis) lebih besar pengaruhnya kepada seseorang, sebab:

a. Minat untuk menghadiri dan berpartisipasi didorong oleh adanya tekanan dan harapan masyarakat, setidak - tidaknya kelompok (pendengar) itu sendiri. Ia tidak di senangi oleh teman-teman jika kurang rajin, sebaliknya akan mendapat pujian jika besar partisipasinya dalam kegiatan kelompok;
b. perubahan sikap nampaknya lebih mungkin terjadi jika seseorang berada dalam kelompok. Dan lagi, keputusan kelompok akan lebih mungkin diterima seseorang jika ia ikut serta dalam pembuatan keputusan. Dengan berte- munya dalam kelompok dan pembahasan keputusan dengan teman-teman, mungkin seseorang akan lebih cepat ter - bentuk sikapnya.

c. mungkin pula besarnya pengaruh forum media (misalnya kelompok pendengar) itu karena saluran ini masih baru dan kredibilitasnya tinggi.

• Wirid-wirid Keagamaan

Kegiatan pendidikan luar sekolah dapat juga disejalankan dengan kegiatan wirid-wirid keagamaan, khususnya agama Islam. Suatu hal yang sudah membudaya di desa adalah pelaksanaan wirid/pengajian agama secara berkala, misalnya satu kali dalam seminggu atau sekali dalam dua minggu. Dari segi keteraturan waktunya kegiatan ini sudah memenuhi salah satu unsur pendidikan luar sekolah. Akan tetapi dari segi materi yang diberikan kiranya belum dapat dikatakan sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah. Sebab pada umumnya materi wirid/pengajian ini lebih banyak diserahkan kepada sumber belajar dan terfokus kepada masalah hubungan manusia dengan Tuhannya atau masalah ibadat dalam arti sempit.

Sesuai dengan ajaran agama (Islam) sendiri yang menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu dari ayunan sampai keliang lahat, serta anjuran agar manusia itu hidup untuk dunia dan untuk akhirat, kiranya kegiatan wirid ini dapat diprogramkan menjadi kegiatan pendidikan yang sedikit terstruktur dan terorganisir, yakni pendidikan luar sekolah.

Agar kegiatan wirid jadi terorganisir dan terstruktur, maka harus ada serangkaian kegiatan wirid yang membahas materi-materi tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan belajar tertentu pula. Jika suatu program dapat diselesaikan dapat diganti dengan program berikutnya. Dengan demikian materi yang diberikan oleh berbagai sumber belajar dapat menjadi seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang boleh dikatakan utuh, terikat dalam suatu pa-

radigma. Kiranya hal ini tidak akan sulit dilaksanakan, sebab bukankah agama itu memberikan petunjuk dalam segala bentuk kegiatan kehidupan manusia, serta memberi petunjuk untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk kehidupan maupun untuk persiapan menghadapi kematian.

Akhirnya, dengan terlaksananya semua kegiatan pendidikan di atas secara terorganisir dan terprogram, setidaknya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan minimal bagi masyarakat desa menjadi semakin luas yang pada gilirannya dapat memacu lajunya pembangunan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup baik secara lahiriah mau pun secara batiniah, baik secara mental mau pun secara spiritual.

DAFTAR BACAAN

1. Coombs, Philip H. dan Ahmed, Manzoor. Memerangi Kemiskinan melalui Pendidikan Non-Formal. Terjemahan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (YIIS). Jakarta: Rajawali, 1984.

2. Coombs, Philip H. Pendidikan Luar Sekolah, (Buletin Olah Raga, Pemuda dan Pendidikan Masyarakat). Jakarta: Dirjen Olah Raga dan Pemuda, 1974

3. Depdikbud. Buku Pelengkap Pedoman Tutor Program Kejar Paket 'A' yang Dipadukan dengan Pendidikan Mata Pencarian. Jakarta: Dierektorat Pendidikan Masyarakat, 1984

4. ----------. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah yang Dilaksanakan oleh Masyarakat (Dilusemas). Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, 1985

5. ----------. Paket Latihan Teknik-teknik Dasar Pembangunan Masyarakat. Jayagiri-Lembang: BPKB Jayagiri-Lembang, 1987/1988

6. Faisal, Sanapiah. Pendidikan Luar Sekolah di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional. Surabaya: Usaha Nasional, 1981

7. ----------. Menggalang Gerak Bangun Diri Masyarakat Desa. Surabaya: Usaha Nasional, 1981

8. Hamijoyo, Santoso S. Peranan Pendidikan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Badan Pengembangan Pendidikan Depdikbud, 1970

9. Harian Umum KOMPAS, 12 Januari 1989

10. Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 1975

11. Nurtain. Memerangi Kemiskinan Melalui Pendidikan Non - Formal (Paper individual untuk memenuhi tugas-tugas dalam mata kuliah kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah). Bandung: Sekolah Pasca Sarjana IKIP Bandung, 1979

12. Naim, Muchtar. Prisma. Nomor 4 Tahun 1973

13. Rogers, Everett M. dan Shoemaker, F. Floyd. Memasyarakatkan Ide-ide Baru, (terjemahan Abdillah Hanafi). Surabaya: Usaha Nasional, 1981

14. Surjadi, A. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Alumni, 1983

15. Surakhmad, Winarno. Mencari Strategi Pembinaan Pendidikan Pembangunan Dewasa Ini. Tanpa tempat dan Penerbit, 1977

16. Sitomorang, D.M. Metoda Mengajarkan Paket 'A' Terpadu dengan Pendidikan Mata Pencarian. (dalam Prisma Nomor 6, Tahun 1982)

17. Solfema. EksistensiPendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam Pembangunan Nasional. Padang: FIP IKIP Padang, 1987

18. Tim Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Negeri RI. UUD 1945, GBHN dan P-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1983

19. Aliasar. Peranan Pendidikan Luar Sekolah dan Orang Dewasa dalam Pembangunan Masa Depan. (Makalah disampaikan dalam Seminar Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Padang pada Tanggal 28 - 29 Oktober 1980)